

KEPALA DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

RANCANGAN PERATURAN DESA WARAKAS NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARAKAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4)
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
 Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
 Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
 Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan
 penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala
 Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Warakas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037):
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perubahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
- 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
- 30. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
- 31. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
- 32. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS dan KEPALA DESA WARAKAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. pelaksanaan Pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa, Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah

- 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
- 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa
- 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah
- 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya

- ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
- 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
- 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi menyediakan produktivitas, jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN

- Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
- 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
- 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
- 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar

- 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
- 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
- 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
- 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
- 12. Gambar Desain Kegiatan.

- 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
- 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
- 16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
- 17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
- 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
- 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
- 21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
- 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
- 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023.
- 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
- 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
- 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

 terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

> Ditetapkan di Desa Warakas Pada tanggal, 26 September 2022 KEPALA DESA WARAKAS,

ASMANI

Diundangkan di Desa WARAKAS Pada tanggal 26 Sepember 2022 SEKRETARIS DESA WARAKAS

SAEFULLAH

LEMBARAN DESA WARAKAS TAHUN 2022 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG; (1010/2022)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ASMANI

: Kepala Desa Warakas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Warakas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. MAMAN F

Ketua BPD Desa Warakas

ROHMAT

Wakil Ketua BPD Desa Warakas

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Warakas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

 PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU.

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kecamatan Binuang untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.

Mengetahui,

Ketua BPD,

MAMAN F

Wakil Ketua BPD,

ROHMAT

DAFTAR HADIR KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ASMANI	Kepala Desa	m
2	SAEFULLAH	Ketua Tim Penyusun RKPDes	
3	JIMI MUHAMAD	Anggota Tim Penyusun RKPDes	
4	H.Maman F.	Ketua BPD	All W
5	ROHMAT	Wakil Ketua BPD	Amet
6	WIMAH	Sekretaris BPD	The
7	Abdul Sukron	Anggota BPD	Ama
8	NASUKI	Anggota BPD	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

Jam : 13.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Kantor Desa Warakas

Kehadiran : Laki-laki = ...2.4.... orang

Perempuan =9..... orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD.

3. Sambutan Kepala Desa Warakas

4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa

Tahun Anggaran 2023.

5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Warakas

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD (MAMAN F)

- 3. Sambutan Kepala Desa (ASMANI)
- 4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
- 5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat :Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- 1. Pembaharasan dan Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan Pimpinan Rapat,
- 2. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 selanjutanya akan di tuangkan Kedalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

Warakas, 20 Juli 2022

Sekretaris Rapat,

(NI -

Pimpinan Rapat,

AMAN F

ROHMAT

Leuckapt DH ini

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Tanggal

: 20 Juli 2022

Jam

: 13.00 Wib

Tempat

: Kantor Desa Warakas

			1	<u> </u>		•
NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA	TANGAN
1	2		3	4		5 Ta
1	Sacrullah	6	vy. Panddown	 	¹ 4	2 /2-
2	Asmani	レ	19. Kawao	Kades		/ 011
3	KAMTARI	<u>_</u>	K-8-KAWIAD	RWOI	3 Nula	4
4	Schands	L	BPYUKY	TOKMAS	4=05	Status_
5	MINah	L	MUNUS	Ustadz	5 mA	6
6	Serpini	L	14. Kauto	Masyarakat	11.	Joe .
7	Muhammad Anae	レ	Kawao	Stort Dera	7 GMs	8
8	m. ANIAT	L	KY.KAWAO	ANGGOTA KIT	OV.	1/39
9	H. Maman F	し	pandelekan	Ketua BPD	9	10 Lhu
10	WINAH	P	pandewan	Anagola BPD	7	G 100-
11	Cecep Mulyadi	L	Menas	RW 04	11 (1)	12
12	M: SULYA'	L	KP. BIYUKU	MKSARAKAT		
13	RasTam	し	Panpelekan	R	13 P T	¹⁴ #5
14	Dixen Swawati	4	Kp found elekan		Fan	g
15	Is paul Hayati 1	1	Kawao	Kader	15	16
16	Choirul Liumah	ρ	Wanulch	Kader	What!	+1/W
17	Rohmatullah	L	wallelwh.	6pd	17 tant	18 $^{-1}$
18	JULIYAH	ρ	KAWAO	KADER	quive	00
19	hamnah	P	Kawao	Kader	19/1/	20 7
20	IRPAN SAHRONI	L	KAWAO	STAFF DESA	1000	and the
21	71SAH	₽	KP. MENE	KADER	21 b	22
22	H. WALIR	し	CAWYO	TOK-MASY	G=	1
23	Addul Syukion.	L	Kg. Wawuloh.	BPD '	23 Mud	24
24	URSah	4	by Kawao	Maryenit	7	4
25	Pude	P	M. Kautio	posyanda	25	²⁶
26	DIDING	L	KAWAD	LPM	02.	1627
27	Jim muhamad	L	menes	Staff	²⁷ A 1	²⁸ 15
28	*ASEP	<u>_</u>	BOJONG		TU	7
29	Kamsar.	L	pandulkan	Masquarat	Q_{α}^{29}	30
30	Karya.	レ	kp. Wawelch	Staff Desa.	عجد	CHARL)
31	Muhammad & 8	L	Up. Mines	7 11 11 11	31	32 \mathcal{G}
32	JENIAL A	L	KP. SIDO Muly	a. '//	14/4	<i></i>
33	Caepusin.	L	KAWAO	11	33	³⁴ A
34	V		•			14
35					35	36
36						







BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

Alamat: Jl. Warung Selukr KM. 7,5 Kp. Biyuku Warakas Binuang 42196

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS Nomor :410/.**03**/BPD/IX/2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESATENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
 Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan
 Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang
 dan fungsinya untuk membahas Rancangan
 Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-UndangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Nomor 8 9. Peraturan Pemerintah Tahun Penyusunan, Tahapan, Tatacara tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan beberapa Tahun Pemerintah Nomor 8 2016 tentang Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua atas Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Bersumber Dari Anggaran Desa Yang Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri N**bankaratura**n Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- Desa Pembangunan 15. Peraturan Menteri daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Pendirian, Nomor 4 Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor6);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
- 38. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
- 39. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 2027:
- 40. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan

: Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pembahasan Desa Warakas dan pada penyepakatan Rancangan RKP Desa bertempat di tanggal 20 Juli 2022 yang Warakas Kecamatan Kantor Desa Desa Binuang Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

berlaku : Keputusan ini mulai sejak tanggal apabila ditetapkan ketentuan dengan hari kekeliruan dikemudian terdapat akan diadakan perbaikan didalamnya, maka sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Desa Warakas Pada tanggal 20 Juli 2022 KETUA BPD WARAKAS,

MAMAN F

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Warakas yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

- 1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- 3. pencermatan ulang RPJM Desa;
- 4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa:
- 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
- 6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;

- 2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- 3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Warakas dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Serang;
- Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Warakas selama satu tahun; dan
- Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Warakas.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Warakas ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Warakas secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Warakas, 27 September 2022

Kepala Desa Warakas

ASMANI

DAFTAR ISI

	Turan desa tentang rencana kerja pemerintah i N 2022	DESA
	AHUN 2023 EKLIS KELENGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA i ATA PENGANTAR iii AFTAR ISI	
		•
	AR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	
	1.2. Dasar Hukum	
	1.3. Tujuan dan Manfaat	
	1.4. Proses Penyusunan RKP Desa 7	
	1.5. Sistematika 7	
BAB II		
	2.1. Visi dan Misi Kepala Desa9	
	2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya 10)
	2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	
	2.4. Gambaran Umum Ekonomi	2
	2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur 14	1
BAB II	I RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
	3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa	
	Tahun sebelumnya 16	5
	3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	
	3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa 17	7
	3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	
	antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi	
	dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan	•
	3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan	
	Pembangunan Daerah 19	•
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	
	PEMBANGUNAN DESA	
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa	
	Tahun Anggaran 2023	
	4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	
	4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	
	Tahun Anggaran 2023	
	4.5. Kebijakan Keuangan Desa	
BAR V	PENUTUP	
·	Penutup	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
- 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
- 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
- 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
- 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
- 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
- 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
- 12. Gambar Desain Kegiatan.
- 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
- 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
- 16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
- 17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
- 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
- 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
- 21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
- 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
- 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023.
- 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
- 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
- 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
- 27. Peta Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
- 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
- 30. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
- 31. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 2027;

32. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke- 2 tahun (perencaaan RPJM Desa) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2027.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 Proses Penyusunan RKP Desa

Proses Penyusunan RKP Desa Warakas Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- 3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
- 4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
- 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- 6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Warakas Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi Misi Kepala Desa
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V

PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi Dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Warakas disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Warakas sebagai berikut:

"Terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai"

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Warakas merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Warakas

Dalam meraih visi Desa Warakas seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Warakas diantaranya:

- 1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
- 3. Menata Pemerintahan Desa Warakas yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
- 5. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- 6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

- 7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .
- 8. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan.
- 9. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi Jalan Desa dan Lingkungan atau Pemukiman di Desa.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 4.450 jiwa yang terdiri dari 1.996 jiwa laki laki dan perempuan 2.454 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
*	(Taran)			
1.	0 - 4	92 Jiwa	87 Jiwa	179 Jiwa
2.	5 - 9	137 Jiwa	212 Jiwa	349 Jiwa
3.	10 - 14	163 Jiwa	250 Jiwa	413 Jiwa
4.	15 - 19	152 Jiwa	174 Jiwa	326 Jiwa
5.	20 - 24	176 Jiwa	256 Jiwa	432 Jiwa
6.	25 - 29	157 Jiwa	133 Jiwa	290 Jiwa
7.	30 - 34	156 Jiwa	186 Jiwa	342 Jiwa
8.	35 - 39	153 Jiwa	173 Jiwa	326 Jiwa
9.	40 - 44	161 Jiwa	168 Jiwa	329 Jiwa
10.	45 - 49	156 Jiwa	127Jiwa	283 Jiwa
11.	50 - 54	176 Jiwa	241 Jiwa	417 Jiwa
12.	55 - 59	121 Jiwa	145 Jiwa	266 Jiwa
13.	60 - 64	156 Jiwa	215 Jiwa	371 Jiwa
14.	65 +	40 Jiwa	87 Jiwa	127 Jiwa
	Jumlah	1.996 Jiwa	2.454 Jiwa	4.450 Jiwa

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	20	2020		2021		2022	
Masilikasi	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	336	373	354	423	405	431	
Angkatan Kerja	427	415	568	463	580	489	
Mencari Kerja	267	235	285	269	345	289	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Warakas, masih terdapat 23 perempuan yang belum tamat SD dan 29 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	23	29	35
2.	Tamat SD	664	659	1.323
3.	Tamat SLTP	525	760	585
4.	Tamat SLTA	791	895	1.686
5.	Tamat D1-D3	35	18	53
6.	Tamat S1	23	28	51
	Jumlah	2.061	2.389	4.450

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Warakas, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4 Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	92%	90%	90%
Angka Kematian Bayi (IMR)	0%	0%	0%
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0%	0%	0%
Cakupan Imunisasi	95%	95%	95%
Balita Gizi Buruk	0%	0%	0%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Warakas sejumlah 635 KK, yang tersebar hampir merata di semua Kampung 14 (Empat Belas) Rukun Tetangga (RT).

Tabel 5 Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Hampir Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Miskin	575 KK	597 KK	635 KK
Kaya	448 KK	460 KK	657 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	1.023 KK	1.057 KK	1.292 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Warakas Tahun 2022

	PDR	Laju	
Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan	Pertumbuhan %
2022	24,2%	25,9%	51,1%
2021	28,2%	25,9%	53,1%
2020	30,2%	25,9%	55,1%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun				
110	Komoditas	2020	2021	2022		
1.	Tanaman Pangan					
	- Padi	265 ha	245 ha	220 ha		
	- Jagung	0 ha	0 ha	0 ha		
	- Ubi Kayu	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha		
	- Timun	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha		
**************************************	- Kacang Panjang	1,5 ha	1,2 ha	0,9 ha		
2.	Buah Buahan					
	- Mangga	0 ha	0 ha	0 ha		
3.	Perkebunan					
	- Kelapa	0,4 ha	0,3 ha	0 ha		

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun				
140	Romoultas	2020	2021	2022		
1	Peternakan					
	- Sapi	0	0.	0		
	- Kerbau	21	12	10		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Kambing	175	95	132		
	- Ayam	456	507	614		

No	Komoditas	Produksi / Tahun										
		2020	2020	2020								
2	Perikanan											
	- Keramba	0	0	0								
	- Tambak	0	0	0								
·	- Empang	0	0	0								

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Warakas sebagai berikut:

Tabel 9 Kondisi Infrastruktur Perhubungan

		Kon	disi	
No	Uraian	Baik (M) Rusak (M)		Jumlah Panjang Jalan
1	Jalan Desa		<u> </u>	
-	- Aspal/Betonisasi	540	1.602	2.142
· -	- Makadam	0	0	0
	- Tanah	0	670	670
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal/Betonisasi	1.384	1.260	2.644
	- Makadam	732	1.341	2.073
	- Tanah	0	2.340	2.340

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 10 Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kor	Jumlah	
110.	Oldidii	Baik	Rusak	Juman
1.	Saluran Primer	935	1.873	2.808
2.	Saluran Skunder	1.336	3.954	5.290
3.	Saluran Tersier	665	895	1.560

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	95 KK	109 KK	120 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	87 unit	109 unit	121 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenahi pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

 APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.

- 2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan yang setatus Jalan Poros Desa sudah memprihatinkan terutama di Kp. Pandelekan s/d Bojong, jalan menuju wilayah antar Kecamatan sehingga menghambat sistem koordinasi, singkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
- Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.
- 4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGS Desa

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang masuk pada tipologi Desa Warakas sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Warakas di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni;

- 1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
- 2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
- 3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Warakas tahun 2022-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2027 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.
- Pelaksanaan RPJM Desa Harus sesuai apa yang di rencanakan
- Pelaksanaan Sektor Pembangunan Kemajuan desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Pelaksanaan RPJMDesa lebih mementingkan skala Prioritas
- Pelaksanaan RPJMDesa lebih mengutamakan Kepada atau mengacu ke musywarah desa.
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen **RKP** DesaTahun 2023 adalah Peningkatan Pelayanan dan Admistrasi di Pemerintahan Desa sehingga Mampu dapat meningkatkan Pelayanan Admintrasi Kependudukan Secara Merata.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen **RKP** DesaTahun 2023 adalah Peningkatan Pembangunan sektor Pembangunan Jalan, Jalan Usaha Tani dan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan,Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok

Usaha Ekonomi Produktif, Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Lokal Desa serta siap dalam keadaan darurat dan mendesak desa.

3.4. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

- Masih banyak tepian drainase yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
- 2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
- 3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
- 4. Kurangnya kewaspadaan masyarakat desa terkait bencana alam
- 5. Aliran sungai yang belum oktimal perawatanya
- 6. Kurangnya Pemahaman akan tanggap bencana desa

3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. Bidang Ekonomi

- 1. Belum meratanya Bantuan UMKM bagi Masyarakat Miskin yang membutuhkan Modal Usaha.
- 2. Masyarakat desa masih keterbatasan dalam memproduksi prodak dalam jumlah Bannyak.
- 3. Masyarakat masih belum bisa memasarkan hasil peroduksi pertaniannya dan menjalin kemitraan usahanya.
- 4. Masyarakat desa belum mendapatkan pelatihan tentang UMKM.
- 5. Peningkatan Pengembangan usaha ekonomi produktif.

II. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

- 1. Kuranya Pelayanan Publik Bagi Masyarakat untuk Mempercepatan dan Meningkatan Kesejahtraan Masyarakat di desa.
- 2. Kuranngnya Bantuan Sosial yang merata.
- 3. Masih adaya kesejangan sosial di masyaakat desa dalam hal lapangan pekerjaan.
- 4. Kurang adanya perhatian khusus dibidang budaya yang di desa oleh pihak pemerintah kabupaten atau Daerah.
- 5. Kurang adanya pembangunan di bidang situs budaya di desa.

III. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- 1. Belum adanya penerangan jalan umum.
- 2. Belum adanya Pembangunan Sanitasi dan air bersih
- 3. Belum meratanya pembangunan listrik perdesaan
- 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
- 5. Belum adanya Pembangunan Jalan ekonomi Pertanian Masyarakat Desa
- 6. Belum adanya Pembangunan Jembatan Penghubung di Desa.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benarbenar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Warakas secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 - 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - 2. Operasional Perkantoran;
 - 3. Operasional BPD;
 - 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 - 6. Kegiatan Musdes
 - 7. Kegiatan Pembahasan Musdes RKPDes
 - 8. Kegiatan Pembahasan Musdes APBDes
 - 9. Kegiatan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisifatif
 - Penyusunan Pendataan Profil Desa

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
 - 1. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
 - 2. Penyelenggaraan Bidang Kesehatan
 - 3. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/Pemukiman Desa
 - 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan/Pemukiman Desa
 - 5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Tani
 - 6. Pengelolaan dan Pembuatan jaringan (Web Desa)
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
 - 1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
 - 3. Fasilitasi TP-PKK;
 - 4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa.
 - 5. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 - 6. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 7. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - 2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan .
 - 3. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - 4. Peningkatan kapasitas kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 5. Peningkatan kapasitas BPD.
 - 6. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 - 7. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak.
 - 8. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 - 9. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.
 - Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).

4.2. Berdasarakan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022.-2027. dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2027 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.

- Pelaksanaan RPJM Desa Harus sesuai apa yang di rencanakan
- Pelaksanaan Sektor Pembangunan Kemajuan desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Pelaksanaan RPJMDesa lebih mementingkan skala Prioritas
- Pelaksanaan RPJMDesa lebih mengutamakan Kepada atau mengacu ke musywarah desa.

4.3. Berdasarakan Kewenangan Lokal Skala Desa

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Warakas yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. Bidang Ekonomi

- 1. Belum meratanya Bantuan UMKM bagi Masyarakat Miskin yang membutuhkan Modal Usaha.
- 2. Masyarakat desa masih keterbatasan dalam memproduksi prodak dalam jumlah Bannyak.
- 3. Masyarakat masih belum bisa memasarkan hasil peroduksi pertaniannya dan menjalin kemitraan usahanya.
- 4. Masyarakat desa belum mendapatkan pelatihan tentang UMKM.
- 5. Peningkatan Pengembangan usaha ekonomi produktif.

II. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

- 1. Kuranya Pelayanan Publik Bagi Masyarakat untuk Mempercepatan dan Meningkatan Kesejahtraan Masyarakat di desa.
- 2. Kuranngnya Bantuan Sosial yang merata.
- 3. Masih adaya kesejangan sosial di masyaakat desa dalam hal lapangan pekerjaan.
- 4. Kurang adanya perhatian khusus dibidang budaya yang di desa oleh pihak pemerintah kabupaten atau Daerah.
- 5. Kurang adanya pembangunan di bidang situs budaya di desa

III. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- 1. Belum adanya penerangan jalan umum.
- 2. Belum adanya Pembangunan Sanitasi dan air bersih
- 3. Belum meratanya pembangunan listrik perdesaan
- 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
- 5. Belum adanya Pembangunan Jalan ekonomi Pertanian Masyarakat Desa
- 6. Belum adanya Pembangunan Jembatan Penghubung di Desa.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih

mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.400.801.400,-(Satu Miliar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian		Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	823.627.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan		
	Retribusi Daerah Kabupaten Tahun	Rp.	73.376.200,-
	Anggaran 2022		
4.	Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun	D	402 700 000
	Anggaran 2022	Rp.	403.798.200,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	100.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	 	
	- Silpa Tahuan Sebelumnya	Rp.	67.612.066,-
	JUMLAH	Rp.	1.468.413.466,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang		Jumlah
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	436.969.090,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	320.842.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakat Desa	Rp.	35.105.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masayarakat Desa	Rp.	64.447.376,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	334.800.000,-
	TOTAL	Rp.	1.192.163.466,-

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelanggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah							
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	208.000.000,-						
2.	Tunjangan dan Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	68.250.000,-						
	Jumlah	Rp.	276.250.000,-						

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

> Ditetapkan di Desa Warakas Pada tanggal 27 September 2022 Kepala Desa Warakas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)

TAHUN ANGGARAN 2023

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023

DESA : WARAKAS KECAMATAN : BINUANG KABUPATEN : SERANG PROVINSI : BANTAEN

				Menduk	Ē.	Target				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Pola	Pelaksa	naan	
No	Bidang		Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola		Kerjasa ma Pihak Ketiga	Rencana Pelaksana Kegiatan
1	Penyelenggaraan	+ +	d	c	<i>f</i>	8	h	i	j	k	1	m	n	0	р	q
•	Pemerintahan Desa	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa					l							,	
			1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1.2.3	1 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2023	44,400,000	ADD	V			Kaur Umun
		1 L	2. Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	1.2.3	1 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Sekdes	2023	32,400,000	ADD	√			Kaur Umun
			3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kaur dan Kasi Desa	1.2.3	6 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kasi & Kaur	2023	165,600,000	ADD	√			Kaur Umum
		P	Penyediaan Tujangan BPD				<u> </u>									
			1. Tunjangan Ketua BPD	1.2.3	1 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua BPD	2023	10,800,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.2.3	1 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Wakil Ketua BPD	2023	9,600,000	ADD	v			Kaur Umum
	ĺ		3. Tujangan Sekretaris BPD	1.2.3	1 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Sekretaris BPD	2023	9,000,000	ADD	V			Kaur Umum
			1. Tunjangan Anggota BPD (4 orang)	1.2.3	4 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Anggota BPD	2023	33,600,000	ADD	√			Kaur Umum
		c]	aminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa													
		1	I. Jaminan Sosial untuk Kepala Desa	1.2,3	1 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2023	6,000,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa	1.2.3	7 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perangkat Desa	2023	33,600,000	ADD	√			Kaur Umum
		d l	Penyediaan Insentif Ketua RT/RW									• •			-+	
		1	l. Insentif Ketua RT (14 Orang)	1.2.3	16 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RT	2023	50,400,000	ADD	V			Kaur Umum
		2	2. Insentif Ketua RW (4 orang)	1.2.3	3 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RW	2023	14,400,000	ADD	√			Kaur Umun
		-	2. Insentif Pemandi Jenazah	1.2.3	15 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RW	2023	9,000,000	ADD	V			Kaur Umun
			Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa (2 orang)	1.2.3	2 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kebersihan dan Penjaga Kantor	2023	12,000,000	ADD	٧			Kaur Umum
		_	Operasional Kantor Desa						Desa					\longrightarrow		
			. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	12,000,000	ADD	1			Kaur Umum
		2	2. Belanja Langganan Listrik	IX I	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	14,400,000	ADD	v'		_	Kaur Umum
		3	i. Belanja Langganan Internet	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	12,000,000	ADD	√			Kaur Umum

			Menduk		Target			Sasaran/	Waktu			Pola	Pelaksa	maan	_
io	Bidang	Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	Rencan Pelaksar Kegiata
	b	<u>d</u>	e	f	8	h	ĺ	j	k	Ī	m	n	0	p	q
:		4. Belanja Peralatan Rumah Tangga Kantor	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	5,700,000	ADD	V			Kaur Un
		5. Belanja Peralatan Listrik dan Air	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	7,500,000	ADD	√			Kaur Un
		6. Belanja Laptop dan Printer	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Perangkat Desa	4 Unit	Perangkat Desa	2023	22,500,000	DD	√			Kaur Un
		7. Pakaian Dinas Perangkat Desa	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Perangkat Desa	8 Stell	Perangkat Desa	2023	14,500,000	ADD	1			Kaur Un
		g Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten				1						-			
		1. Perjalanan Dinas Kepala Desa	18	Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kepala Desa	2023	4,500,000	ADD	√			Kaur Um
		2. Perjalanan Dina Sekretaris Desa	18	Pelaksanaan Kinerja Sekretaris Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Sekretaris Desa	2023	3,500,000	ADD	4			Kaur Um
		3. Perjalanan Dinas Kasi dan Kaur	18	Kinerja Perangkat Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kasi dan Kaur	2023	6,500,000	ADD	V			Kaur Um
		h Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Penunjang Kinerja Perangkat Desa	100%	Kantor Desa	8 Stell	Perangkat Desa	2023	4,400,800	ADD	7			
ŀ		i Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak													
		1. Kendaraan Dinas Mobil Ambulan dan Motor	18	biaya operasional Kendaraan Dinas	100%	Kantor Desa	2 unit	Operasional Kantor	2023	900,000	BHPRD	V			Kaur Un
		Penyediaan Operasional BPD													
		Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18	kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	12,000,000	ADD	V			Kaur Un
	Ì	2. Belanja Pengadaan Cetak/Penggandaan		kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	2,300,000	ADD	V			Kaut Ur
		3. Belanja Barang Komsumsi (Makan/Minum)	18	kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	4,700,000	ADD	٧			Kaur Ur
		4. Belanja Perjalanan Dinas Anggota BPD		kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	2,500,000	ADD	√			Kaur Un
		k Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+			-
		1. Belanja Modal Sewa Kantor Desa		Sewa Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	17,000,000	ADD	V			Kaur Un
		2. Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor	18	Perawatan Peralatan Aset Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	7,550,000	BHPRD	V			Kaur Un
		3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	18	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	6,750,000	BHPRD	V			Kaur Un
		Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan													
1		1. Pembelian Meja dan Kursi		tersedianya aset perkantoran	100%	Kantor Desa	4 Buah	Kantor Desa	2023	15,700,000	BHPRD	-			Kaur Un

				Menduk		Target			Socoson /	TAZ a Later			Pola	Pelaksa	naan	**
No	Bidang		Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	Rencana Pelaksana Kegiatan
а	b		<u>d</u>	е	f	8	h	i	j	k	İ	m	н	0	p	9
			2, Pembelian Laptop,Scana dan Printer	18	tersedianya aset perkantoran	100%	Kantor Desa	3 unit	Kantor Desa	2023	16,500,000	ADD	٧			Kaur Umun
			3. Pembelian Lemari Arsip	18	tersedianya aset perkantoran	100%	Kantor Desa	3 unit	Kantor Desa	2023	12,500,000	BHPRD	√			Kaur Umun
		m	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa*	9	terlaksananya data profil desa	100%	Desa	1 Keg	Desa	2023	31,600,000	DDS	√			Kasi Pemerintahal
		n	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	16:18	pelaksanaan mudes menjadi rutin tahunan	100%	Desa	3 Keg	Desa	2023	15,000,000	DDS	V			Kaur Perencanaan
		o	Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKPDes	16:18	pelaksanaan mudes menjadi rutin tahunan	100%	Desa	3 Keg	Desa	2023	22,500,000	DDS	√ .			Kaur Perencanaan
		P	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan	16:18	pelaksanaan musdes menjadi rutin tahunan	100%	Desa	1 keg	Desa	2023	7,500,000	DDS	1			Kaur Perencanaan
		r	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16:18	pelaksanaan analisa kemiskinan	100%	masuk desa	12 Bulan	masy. Desa	2023	13,700,000	DDS	V			Kasi Pemerintahar
		s	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16:18	Pelaksanaan Rutin Tahunan	50%	Desa	1 Keg	Desa	2023	5,400,000	DDS	, v			Kasi Pemerintahai
											·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	 			
2	Pembangunan Desa		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls		·		1		Jumlah Pe	er Bidang 1	732,400,000					_
2	Lemnangunan txesa		renyetenggaraan Posyandu (MKN Tambahan, KIS Bumil, Lamsia, Insentif)	<u> </u>												
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita dan Bumil	1.2.3	Pelaksanaan Rutin PMT	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Balita dan Bumi	2023	20,400,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtraar
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita Stanting	1.2.3	Pelaksanaan Rutin PMT Pelaksanaan	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Balita	2023	31,500,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtraar
			- Insentif Kader Posyandu	1.2.3	Insentif utk Kader	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kader Posyandı	2023	48,000,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtraar
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dli)	3	Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Masyrakat Des	2023	62,900,000	DDS	V			Kasi Kesejahtraan
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan													
			1. Operasional Ambulance Desa		<u> </u>								L			
			- Honorarium Sopir Ambulance Desa (1 orang)	1.2.3	Rutin Honorarium Sopir	100%	Desa Warakas		Sopir Ambulance Desa	2023	12,000,000	DDS	4			Kasi Kesejahtraan
			- Biaya Perawatan Kendaraan Roda 4 (Ambulance)	1.2.3	Rutin Operasional Ambulan Desa	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2023	15,000,000	DDS	Ý			Kasi Kesejahtraan
			- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.2.3	Rutin Operasional Ambulan Desa	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2023	4,590,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
		ļ	- Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Roda 4	1.2.3	Rutin Operasional Ambulan Desa	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2023	2,650,000	DDS	V			Kasi Kesejahtraan

				Menduk		Target			Sasaran/	Waktu			Pola	Pelaksa	naan	
0	Bidang b		Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	Rencan Pelaksar Kegiata
'	v	\vdash	D. J. C. J.	е	f	8	h	i	j	k	1	111	n	0	p	q
		d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD													1
į			- Pembangunan Tempat Posyandu (Posyandu)	3.9	Belum adanya banguan Posyadu	0%	Kp.Kawao, Kp. Pandelekan dan Kp. Wawuluh	3 uni	Sarana dan Prasana di Posyandu	2023	75,000,000	DDS	v ⁱ			Kasi Kesejahtra
			- Pemeliharaan Tempat Posyandu	3.9	Belum adanya Pemeliharaan banguan Posyadu	50%	Kp. Sidomulya	1 uni	Sarana dan Prasana di Posyandu	2023	12,500,000	DDS	V			Kasi Kesejahtra
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Posyandu	3.9	Belum adanya sarana Kelengkapan di Posyandu	0%	Kp.Kawao, Kp. Pandelekan,Kp. Wawuluh dan Kp.Sidomulya	4 Paket	Sarana dan Prasana di Posyandu	2023	38,000,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtra
		e	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)													
			- Insentif Tutor/Guru BKB/PAUD/PKBM/Guru Ngaji	4	Belum terlaksananya Insentif	0%	Desa Warakas	30 Orang	Tutor/Guru BK	2023	36,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahtra
		ſ	Pemeliharaan Jalan Desa							 -						,
		_	- Pemeliharaan Jalan Desa (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Belum Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Desa	70%	Kp.Kawao Kp. Biyuku, Kp, Kp Sidomulya dan Kn. Menes	960m	Masyarakat Des	2023	773,282,700	DDS	V			Kasi Kesejahtra
		-	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
		15	Canemataan Jalan Osana Tani		Belum											
			- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Paving Blok)	1.2.3.9	terlaksananya Pembangunan Ialan Usaha Tani	0%	Kp.Bojong	530m	Masyarakat Petani	2023	188,373,600	DDS	٧			Kasi Kesejahtra
			- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Paving Blok)	1.2.3.9	Belum terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani	0%	Kp.Wawuluh dan Pandelekan	500m	Masyarakat Petani	2023	116,597,500	DDS	V			Kasi Kesejahtra
		 	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa													••
		++	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-													
		Ĺ	gorong/Solokan/Parit/Drenase dll)													
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	8.9.11	Belum ada Pemerliharaan Jalan	0%	Kp.Kawao	25m	Masyarakat Des	2023	16,979,200	DDs	V			Kasi Kesejahtra
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	8.9.11	Belum ada Pemerliharaan Jalan	0%	Kp.Pandelekan dan Kp. Wawuluh	45m	Masyarakat Des	2023	28,293,300	DDS	V			Kasi Kesejahtra
			- Pameliharaan Irigasi Pertanian/Solokan		Belum ada Pemerliharaan Prasana Pertanian	50%	Kp.Kawao	250m	Masyarakat Petani	2023	126,500,000	DDS	v			Kasi Kesejahtra
		انا	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs				-							\longrightarrow		,

			Menduk		Target			C/	547.7.			Pola	Pelaksa	naan	_
No	Bidang		ung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	Rencana Pelaksana Kegiatan
a	b	d	e	f	8	h	i	j	k	1	tti	n	0	p	9
		- Pemagaran Tanah Kuburan	9.11.18	Belum ada pemagaran kuburan	0%	Kp.Menes	200m	Masyarakat Desa	2023	152,000,000	DDS	V			Kasi Kesejahtra
		- Pemagaran Tanah Kuburan	9.11.18	Belum ada pemagaran kuburan	0%	Kp.Kawao	250m	Masyarakat Desa	2023	85,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahtra
		k Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman ***)													
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	50%	Kp. Kawao	170m	Masyarakat Desa	2023	36,035,000	DDS	V			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Menes	75m	Masyarakat Desa	2023	27,010,000	DDS	V			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp.Sidomulya	120m	Masyarakat Desa	2023	31,285,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp.Biyuku	170m	Masyarakat Desa	2023	36,035,000	DDS	√ ·			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan Drainase	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Biyuku, Kp. Sidomulya dan Kp. Menes	340m	Masyarakat Desa	2023	223,685,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp.Wawuluh		Masyarakat Desa	2023	25,585,000	DDS	V			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan SPAL	8.9.17	Peningkatan Lingkungan Desa	0%	Kp. Kawao	120m	Masyarakat Desa	2023	51,170,000	DDS	V			
		- Pembangunan SPAL	8.9.17	Peningkatan Lingkungan Desa	0%	Kp.Sidomulya	189m	Masyarakat Desa	2023	76,755,000	DDS	Ý			
		- Pembangunan SPAL	8.9.17	Peningkatan Lingkungan Desa	0%	Kp.Biyuku dan Kp. Menes	230m	Masyarakat Desa	2023	102,340,000	DDS	v/			
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	40%	Kp. Pandelekan	30m	Masyarakat Desa	2023	41,001,500	DDS	7			Kasi Kesejahtra
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	40%	Kp.Wawuluh		Masyarakat Desa	2023	73,169,200	DDS	√			Kasi Kesejahtra

				Menduk		Target							Pola	Pelaksa	maan	
No	Bidang		Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola		Kerjasa ma Pihak	Rencana Pelaksana Kegiatan
а	b		d	e	f	8	h	i	j	k	I	m	n	o	Ketiga v	a
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	20%	Kp.Bojong	930n	Masyarakat Desa	2023	369,669,100	DDS	V			Kasi Kesejahtraai
		I	Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier/sederhana				 	 		+	······································		<u> </u>			
		m	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)					•								
			- Pengadaan tempat Pembuangan Sampah	3,6,15	Belum adanya tempat Pembuangan	0%	14 RT	28 uni	Masyarakat Desa	2023	105,000,000	DDS	1			Kasi Kesejahtraar
			- Pengadaan Gerobak Pembuangan Sampah	3,6,15	Sampah belum adanya prasana utk membuang	0%	14 RT	14 Unit	Masyarakat Desa	2023	14,700,000	DDS	7			Kasi Kesejahtraan
]	n	Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati		samnah				 	-		·	ļ			
			- Pengadaan Bibit Kambing dan Lele	1,2	belum adanya Bibit	0%	14 RT	14 Kelompok	Masyarakat Desa	2023	14,700,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraar
			- Pengadaan Bibit Tumpang Sari		belum adanya Bibit	0%	14 RT	14 Kelompok	Masyarakat	2023	14,700,000	DDS	v			Kasi
		0	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Bibit			F	Desa		14,700,000		L V			Kesejahtraar
			- Pembuatan WEB Desa	9	Belum adanya WEB desa	0%	Desa	1 Paket	Informasi dan Publikasi utk Masyarakat Desa	2023	33,055,000	DDS	√		<u></u> -	Kasi Kesejahtraar
		P	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan													
			- Pelatihan Kelompok Tani	1,2	Optimaliasasi pelatihan Kelompok Tani	50%	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2023	7,580,000	DDS	4			Kasi Kesejahtraan
			- Pelatihan Kelompok Tani Budidaya		belum dilaksanakanya Pelatihan Petani Budidaya	0%	De s a Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2023	8,500,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtraan
-									Jumlah P	er Bidang 2	3,138,041,100			<u> </u>		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil)	•	:						37,33,217,733					
į			- Pembangunan Poskambling/Pos Ronda		Belum terlaksananya Pos Keamanan	0%	16 RT	16 unit	Kemamanan Masyarakat	2023	139,200,000	DDS	1			Kasi Pemerintahar
		b	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)					,							$\overline{}$	
			- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Satlinmas Desa	16.18	Belum adanya pelatihan Satlinmas	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Linmas Desa	2023	7,500,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan

				Menduk		Target			C-00	147_1			Pola	Pelaksa	ınaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke	Data Eksisting	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel ola	ama Antar	Kerjasa ma Pihak	Rencana Pelaksan Kegiatai
	b	<u> </u>	d	e	f	8	h	i	i	k	1	m	n	Desa o	Ketiga v	q
		С	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.11.15	Belum oktimalnya pelatihan tanggap Bencana di desa	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT dan Perangkat Desa	2023	8,500,000	DDS	√ √			Kasi Pemerinta
		d	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan bari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa													
		-	- Kegiatan Perayaan HUT RI	10	Kegiatan Rutinan tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023	6,500,000	DDS	V			Kasi Pelaya
		-	- Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) Tingkat Desa	10.18	tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023	35,500,000	DDS	√			Kasi Pelaya
		e	Pembinaan TP PKK Desa	5.17.18	tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus TP PKK	2023	13,500,000	DDS	V			Kasi Pelaya
ĺ		<u> </u>	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	ļ					l	ļ					. T	
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW	10.17.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT/RW	2023	12,500,000	DDS	٧			Kasi Kesejahtr
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	10.17.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Karang Taruna	2023	7,120,000	DDS	νİ			Kasi Kesejahtr
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM	1 100 17 225 1		100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus LPM	2023	7,250,000	DDS	√			Kasi Kesejahti
Τ	Pemberdayaan		Peningkatan kapasitas kepala Desa	T	Pelatihan Rutin		1		Jumlah Pe	r Bidang 3	237,570,000					
	Masyarakat	Н	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4.18				s 1 Kegiatan Pengurus Karang Taruna 2023 7.120,000 DDS V s 1 Kegiatan Pengurus LPM 2023 7.250,000 DDS V Jumlah Per Bidang 3 237,570,000 DDS V s 1 Kegiatan Kepala Desa 2023 4,500,000 DDS V s 1 Kegiatan Perangkat Desa 2023 7.500,000 DDS V	Kasi Pemerint							
		H		10.18 Regiatan Rutinan 100% Desa Warakas 1 Kegiatan 1 Kegiatan Desa 2023 35,500,000 DDS 1			Kasi Pemerint									
		\square	Peningkatan kapasitas BPD		Pelatihan utk BPD	0%	BPD Desa	1 Kegiatan	Anggota BPD	2023	7,500,000	DDS	Ý			Kasi Pemerinta
			Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.18	tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan		2023	8,500,000	DDS	V			Kasi Kesejahtr
		-	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	<u> </u>	tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Anak di desa	2023	7,800,000	DDS	V			Kasi Kesejahtr
		í	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	4.8.17	1	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS	٧	i		Kasi Pelaya
		Б	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	9.8.17	Belum terlaksananya Pelatihan	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS	1			Kasi Pelay
			Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	4.8.12.17	Belum terlaksananya Pelatihan	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Bumdes	2023	17,500,000	DDS	ý			Kasi Pelay
		i J	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dli)	4.8.12.17	Belum terlaksananya Fasilitas	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	7,500,000	DDS	√			Kasi Pelaya

			Menduk		Target							Pola	Pelaksa	inaan	Poncana
No	Bidang	Jenis Kegiatan	ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Swakel	Kerjas Kerjasa Pe	Rencana Pelaksana Kegiatan	
a	b	d	e	f	8	h	i	j	k	1	m	n	0	p	q
5	Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa	a Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak desa	2.8	Penanggulangan Bencana Desa	100%	Desa Warakas	1 Paket/Keg	Masyarakat yg terkena dampak	2023	334,800,000	DDS √	\ \			Kasi Pemerintahar
		b Kesiap Siagaan bencana desa	2.8	Belum adanya Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana Desa	0%	Desa Warakas	1 Paket/ Keg	Masyarakat Desa	2023	15,200,000	DDS	V			Kasi Pemerintahar
								Jumlah P	er Bidang 5	350,000,000					
-															



Warakas, 27 September 2022
Disusun oleh:

SAEFULLAH

DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA

: WARAKAS

KECAMATAN

: BINUANG

KABUPATEN

: SERANG

PROVINSI

: BANTEN

No.	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Aspirasi Masyarakat
1	ASNEN (Ket RT 013)	Kp. Kawao	1. Pembangunan Jalan Usaha Tani 2. Tempat Buang Sampah 3. Penerangan Jalan Umum
2	SAMRONI (Ket RT 002)	Kp. Biyuku	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Solokan atau SPAL Bak Sampah
3	DEDI JUNAEDI (Ket RT 001)	Kp. Kawao	4. Pembangunan Jalan Usaha Tani 1. Pemagaran TPU 2. Penerangan Jalan Umum 3. Bak Sampah
4	SUKRI (Ket RT 009)	Kp. Kawao	4. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 1. Bak Sampah 2. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 3. Penerangan Jalan Umum
5	SARIMIN (Ket RT 012)	Kp. Sidomulya	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani Solokan atau SPAL Penerangan Jalan Umum Bak Sampah
6	SARMAN (Ket RT 003)	Kp. Sidomulya	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani 3. Solokan atau SPAL 4. Penerangan Jalan Umum 5. Bak Sampah
7	SALIMAN (Ket RT 004)	Kp. Menes	1. Pembangunan Jalan Usaha Tani 2. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 3. Pemagaran TPU 4. Bak Sampah 5. Tempat Pembuangan Sampah
8	AMIR (Ket RT 006)	Kp. Pandelekan	1. Penerangan Jalan Umum 2. Bak Sampah 3. Solokan atau SPAL 4. Pembangunan Lingkungan Desa
9	MUHAMMAD SYADELI (Ket RT 005)	Kp. Pandelekan	Penerangan Jalan Umum Bak Sampah Solokan atau SPAL Pembangunan Lingkungan Desa
10	SOPIAN (Ket RT 007)	Kp. Wawuluh	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 2. Solokan atau SPAL 3. Bak Sampah 4. Pembangunan Drainase
11	ASPURI (Ker RT 008)	Kp. Bojong	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Solokan atau SPAL Bak Sampah Pembangunan Drainase Penerangan Jalan Umum
12	RASTAM (Ket RT 011)	Kp. Pandelekan	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Solokan atau SPAL Bak Sampah Pembangunan Drainasa

			1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa					
			2. Solokan atau SPAL					
13	JABIR (Ket RT 010)	Kp. Wawuluh	3. Bak Sampah					
		1	4. Pembangunan Drainase					
1	1	ļ	5. Penerangan Jalan Umum					
-			6. Gapura					
			1. Pembangunan Drainase					
14	H KAMAD (Ket RT 014)	V 6 1 5	2. Pembangunan Gapura					
11	TI KAWAD (Ret KI 014)	Kp. Gardu Pasar	3. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa					
į			4. Pembangunan Jalan Usaha Tani					
<u> </u>			5. Tempat Penahan Tanah (TPT)					
15	KAMTARI (Ket RW 001)	Kp. Kawao	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ketua					
-		-	RT,RW					
			1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang					
16	HERMAN (Ket Karang	TV TV	Taruna					
	Taruna)	Kp. Kawao	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga					
			3. Kegiatan PHBI dan PHBN					
1			1. Pengadaan Bibit Pertanian					
17	SARNA (Kelompok Tani)	Vn Manas	2. Pelatihan Anggota Kelompok Tani					
1	rational pok rum)	Kp. Menes	3. Pelatihan Budidaya Ikan					
			4. Pengadaan ALSINTAN					
			5. Pengadaan Obat Hama					
18	JISAH (K Posyandu 3)	Kp. Sidomulya	1. Pembangunan Tempat Posyandu					
	, - (- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Np. Sidoniurya	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu					
			3. Bak Sampah					
19	SAPINAH (K Posyandu 1)	Kp. Pandelekan	1. Pembangunan Tempat Posyandu					
	(== == == == == = = = = = = = = = = =	Np. 1 anderekan	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu					
	CHOIDIT		3. Bak Sampah					
20	CHOIRUL LIUMAH (K	Kp. Wawuluh	1. Pembangunan Tempat Posyandu					
]]	Posyandu 2)	Ap. Wawuiui	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu					
	ICD ATH TTANACT		3. Bak Sampah					
21	ISPAUL HAYATI (Ket	Kp. Kawao	1. Pembangunan Tempat Posyandu					
	Posyandu 4)	Np. Nawau	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu					

Warakas, 27 September 2022 Mengetahui,

> <u>ASMANI</u> Kepala Desa

LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI RKP DESA TAHUN 2022 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	NOMINAL	REA	LISASI	I/Pr
		KEGIATAN	(Rp)	YA	TIDAK	KET.
1	2	3	4		5	6
	Pid Posyclosomes Postciatala D					
•	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	44,400,000	√		
2	Pengahsilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	198,000,000	7		
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa	41,875,400	√		
	Penyediaan Tunjangan BPD	BPD	63,000,000	√		·
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	BPD	2,373,200	V		
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	RT/RW	64,800,000	√		
7	Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	Desa	12,000,000			
8	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	20,496,890	V		
9	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa	2,156,000	√		
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	9,776,000	√		
11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	2,839,000	V		
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa	8,783,0 00	√		
	Pembangunan Desa				 	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	NOMINAL	REA	LISASI	VET
110.	TROGRAM/ REGIATAN	KEGIATAN	(Rp)	ΥA	TIDAK	KET.
1	2	3	4		5	6
1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Posyandu	34,290,000	1		
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	24,150,000	V		Operasional Ambulan Desa
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	123,643,400	√		Ketahanan Pangan Desa
4	PPKM		65,891,000		V	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang/SPAL	Jalan Lingkuangan Desa	231,487,600	V		
6	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Pengelolaan Lingkungan Hidup	11,380,000	1		
7	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Web Desa	37,055,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	√	
III.	Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	20,020,000	V		
2	Operasional PKK		15,085,000			
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Ketua RT/RW	5,016,958	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	√	
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Masy.Desa	15,040,000		V	Ketahanan Pangan Desa
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Masy.Desa	6,697,000		V	Ketahanan Pangan Desa

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	NOMINAL	REA	LISASI	KET.
140.	I ROGRAMI REGIATAN	KEGIATAN	(Rp)	YA	TIDAK] KEI.
1	2	3	4		5	6
3	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Perangkat Desa	23,158,200		1	
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya					
1.	Penyaluan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)	95 KK	334,800,000	1		Kegiatan Pandemi Covid- 19
2	Kegiatan Penyaluran BLT-Desa	4 Kali Keg.	1,300,000	V		Kegiatan Pandemi Covid- 19

Warakas, **23** September 2022 Kepala Desa

ASMANI

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

				Sumber Dai	na Indikatif	· .·			
				Alokasi Dana		Bantuan	keuangan	Bantuan	
No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	PAD	Dana Desa (APBN)	Desa (bagian dana perimbangan	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	pihak ketiga/lain- lain	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			242,400,000					
1.1.1	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			6,000,000					
1.1.2	Tunjangan BPD		arthur arthur arthur i servera i ben'n de en en en en en en en en en en en en en	46,200,000			. —		
1.2	Belanja Barang dan Jasa			150,700,000					
1.2.2	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			4,400,000					
1.2.3	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		A CONTRACT C	900,000			*** **********************************		
1.2.4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				57,500,000		The second secon		
1.2.5	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			45,700,000	34,000,000		250,000,000		
2	Bidang Pembangunan Desa					 	* 		
2.1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		99,900,000						
2.1.1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		62,900,000						
2.1.2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		46,240,000						
2.1.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		56,000,000						
2.1.4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		28,500,000						
2.2	Pemeliharaan Infrasetruktur Jalan Desa		228,500,000			50,000,000			
2.2.1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		215,000,000						

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Sumber Da	na Indikatif			
	Ī			Alokasi Dana	T	Bantuan	keuangan	Bantuan
No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	PAD	Dana Desa (APBN)	Desa (bagian dana perimbangan	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	pihak ketiga/lain- lain
2.2.2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Solokan/Parit/Drenase dll)		178,500,000					
2.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Pemukiman ***)		208,500,000					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			**************************************				
3.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan		1					1
	Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)		80,000,000			· ·		
3.1.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		25,700,000				the same property and the same	
3.1.2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		8,500,000	* 100 * 10 * 200 * 10 * 10 * 10 * 10 * 1				
3.1.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar		42,000,000		The same state of the same sta		***************************************	
3.1.4	keagamaan, dll) tingkat Desa Pembinaan TP PKK Desa		13,500,000			ļ -		
3.1.5	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		34,500,000					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	······································		·····				
4.1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	······································				 		
4.1.1	Peningkatan kapasitas perangkat Desa							
4.1.2	Peningkatan kapasitas BPD							
4.1.3	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan							
4.1.4	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak						The Conference of States and Stat	
4.1.5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM							
4.1.6	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi						Philippin aming a company page 1963 to the philippin and make his object to	THE STATE OF STATE AS A STATE OF THE STATE O

•

				Sumber Da	na Indikatif			
**	Y-411-416 P			Alokasi Dana	Done begins	Bantuan keuangan		Bantuan
No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	PAD	Dana Desa (APBN)	Desa (bagian dana perimbangan	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	pihak ketiga/lain- lain
4.1.7	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)							
4.1.8	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendamp							
	ingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)							
5	Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa							
5.1.1	Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak desa		285,000,000					
5.1.2	Kesiapsiagaan Bencana Desa		45,000,000					
	JUMLAH BELANJA		1,658,240,000	496,300,000	91,500,000	50,000,000	250,000,000	



Warakas, September 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : DESA WARAKAS KECAMATAN : BINUANG KABUPATEN : SERANG PROVINSI : BANTEN

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah	Sarana dan sanitasi Air Bersih	500,000,000	PU Pusat
		Rumah Tidak Layak Huni	450,000,000	PU Pusat
		Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	750,000,000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	MCK	250,000,000	PU Prov
		Saluran Drenase Jalan Desa	320,000,000	PU Prov
		Penerangan Jalan Umum	230,000,000	PU Prov
		Pembangunan Jembatan Desa	460,000,000	PU Prov
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Pembangunan Jalan Poros Desa	870,000,000	PU Kab
		Pembangunan Jalan Lingkungan/Pemukiman Desa	630,000,000	PU Kab
		Rumah Tidak Layak Huni	257,000,000	PU Kab/Swakelola
	add dans to the first of the second s	Saluran Pengairan Pertanian	470,000,000	PU Kab
		Bantuan Alsintan untuk Kelompok Tani	250,000,000	Dinas Pertanian Kab
		Bantuan Pupuk	175,000,000	Dinas Pertanian Kab
		Bantuan Bibit Pertanian	257,000,000	Dinas Pertanian Kab
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	230,000,000	PU Kab
		Pembangunan Jalan Desa/status Jalan Kabupaten	567,000,000	PU Kab
		,	567,000,000	

Warakas, September 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SAEFULLAH

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2024

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No			Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<u> </u>	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa	<u></u>					
			1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2024	44,400,000	ADD
			2. Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Sekdes	2024	32,400,000	ADD
			3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kaur dan Kasi Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Kasi & Kaur	2024	165,600,000	ADD
		2	Penyediaan Tujangan BPD		<u> </u>				
			1. Tunjangan Ketua BPD	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua BPD	2024	10,800,000	ADD
			2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa Warakas	12 Bulan	Wakil Ketua BPD	2024	9,600,000	ADD
			3. Tujangan Sekretaris BPD	Desa Warakas	12 Bulan	Sekretaris BPD	2024	9,000,000	ADD
			4. Tunjangan Anggota BPD (4 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Anggota BPD	2024	33,600,000	ADD
		3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				2021		אטט
			1. Jaminan Sosial untuk Kepala Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2024	6,000,000	ADD
			2. Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Perangkat Desa	2024	33,600,000	ADD
		4	Penyediaan Insentif Ketua RT/RW					33,000,000	ADD
			1. Insentif Ketua RT (14 Orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RT	2024	57,600,000	ADD
			2. Insentif Ketua RW (4 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RW	2024	10,800,000	ADD
		5	Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa (2 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Kebersihan dan Penjaga Kantor	2024	12,000,000	ADD
			Operasional Kantor Desa			Desa			
			1. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	10,200,000	ADD
			2. Belanja Langganan Listrik	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	14,400,000	ADD
			3. Belanja Langganan Internet	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	12,000,000	ADD
			4. Belanja Peralatan Rumah Tangga Kantor	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	5,700,000	ADD
			5. Belanja Peralatan Listrik dan Air	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	7,500,000	ADD
			6. Pakaian Dinas Perangkat Desa	Perangkat Desa	8 Stell	Perangkat Desa	2024	14,500,000	ADD
		6	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten			 		·	
ł			1. Perjalanan Dinas Kepala Desa	Kantor Desa	12 Bulan	Kepala Desa	2024	4,500,000	ADD
			2. Perjalanan Dina Sekretaris Desa	Kantor Desa	12 Bulan	Sekretaris Desa	2024	3,500,000	ADD
- 1]	3. Perjalanan Dinas Kasi dan Kaur	Kantor Desa	12 Bulan	Kasi dan Kaur	2024		ADD
ļ			Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa	8 Stell	Perangkat Desa	2024	6,500,000 4,400,000	ADD ADD
ļ	ſ	8	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			 			

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
			1. Kendaraan Roda Dua (2 unit)	Kantor Desa	2 unit	Operasional Kantor	2024	900,000	BHPRD
		9	Penyediaan Operasional BPD						
			1. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	7,500,000	ADD
			2. Belanja Pengadaan Cetak/Penggandaan	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	2,300,000	ADD
ŀ			3. Belanja Barang Komsumsi (Makan/Minum)	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	4,700,000	ADD
			4. Belanja Perjalanan Dinas Anggota BPD	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	2,500,000	ADD
			5. Belanja Pakaian Dinas BPD	BPD Desa	5 Stell	Operasional BPD	2024	2,500,000	ADD
		10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
			1. Belanja Modal Pemeliharaan Kantor Desa	Kantor Desa	1 Unit	Kantor Desa	2024	85,700,000	BHPRD
			2. Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	7,550,000	BHPRD
- 1			3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	6,750,000	BHPRD
		11	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan						
			1. Pembelian Meja dan Kursi	Kantor Desa	4 Buah	Kantor Desa	2024	15,700,000	BHPRD
			2. Pembelian Komputer Pc dan Printer	Kantor Desa	2 unit	Kantor Desa	2024	17,500,000	ADD
			3. Pembelian Lemari Arsip	Kantor Desa	3 unit	Kantor Desa	2024	12,500,000	BHPRD
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa*	Desa	1 Keg	Desa	2024	31,600,000	DDS
			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	Desa	3 Keg	Desa	2024	15,000,000	DDS
		<u> </u>	Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKPDes	Desa	3 Keg	Desa	2024	22,500,000	DDS
		12	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan	Desa	1 keg	Desa	2024	7,500,000	DDS
		13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Masyarakat	12 Bulan	masy. Desa	2024	13,700,000	DDS
		14	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1 Keg	Desa	2024	5,400,000	DDS
						Jumlah	Per Bidang 1	770,400,000	
1	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)						
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita dan Bumil	Desa Warakas	12 Bulan	Balita dan Bumil	2024	20,400,000	DDS
- 1			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita Stanting	Desa Warakas	12 Bulan	Balita	2024	31,500,000	DDS
			- Insentif Kader Posyandu	Desa Warakas	12 Bulan	Kader Posyandu	2024	48,000,000	DDS
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Warakas	12 Bulan	Masyrakat Desa	2024	62,900,000	DDS
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						
		<u> </u>	1. Operasional Ambulance Desa						
			- Honorarium Sopir Ambulance Desa (1 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Sopir Ambulance Desa	2024	12,000,000	DDS

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
			- Biaya Perawatan Kendaraan Roda 4 (Ambulance)	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2024	15,000,000	DDS
			- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2024	4,590,000	DDS
			- Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Roda 4	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2024	2,650,000	DDS
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD						
			- Pembangunan Tempat Posyandu (Posyandu)	Kp.Pandelekan, Kp.Wawuluh, Kp.Sidomulya	3 unit	Sarana dan Prasana di Posyandu	2024	195,000,000	DDS
			- Pemeliharaan Tempat Posyandu	Kp. Kawao	1 unit	Sarana dan Prasana di Posyandu	2024	35,000,000	DDS
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Posyandu	Kp.Kawao, Kp.Wawuluh, Kp. Sidomulya	3 Paket	Sarana dan Prasana di Posyandu	2024	41,000,000	DDS
		4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)						
			- Insentif Tutor/Guru BKB/PAUD	Desa Warakas	25 Orang	Tutor/Guru BKB	2024	30,000,000	DDS
		5	Pemeliharaan Jalan Desa						
			- Pemeliharaan Jalan Desa (Cor/Betonisasi)	Kp.Pandelakn s/d Kp.Bojong	1260m	Masyarakat Desa	2024	973,282,700	DDS
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						
	-		- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Cor Manual)	Kp. Menes s/d Kp. Kawah	530m	Masyarakat Petani	2024	188,373,600	DDS
	;		- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Cor Manual)	Kp. Kawao	500m	Masyarakat Petani	2024	116,597,500	DDS
		6	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Solokan/Parit/Drenase dll)						
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp.Pandelekan		Masyarakat Desa	2024	16,979,200	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp. Bojong		Masyarakat Desa	2024	28,293,300	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp.Wawuluh		Masyarakat Desa	2024	43,399,400	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp. Menes		Masyarakat Desa	2024	37,367,300	DDS
		<u></u>	- Tembok Penahan Tanah (TPT) - Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp. Gardu Pasar		Masyarakat Desa Masyarakat Desa	2024 2024	182,170,200 31,380,200	DDS
			,	Kp,Sidomulya		<u> </u>			
			- Pembangunan Gorong-Gorong	Kp.Pandelekan	<u> </u>	Masyarakat Desa	2024	6,066,000	DDS
	i	<u> </u>	- Pembangunan Drenase Jalan	Kp. Menes	400m	Masyarakat Desa	2024	121,000,000	DDS
			- Pameliharaan Irigasi Pertanian/Solokan	Kp.Kawao	250m	Masyarakat Petani	2024	67,500,000	DDS
1 1		8	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs			<u> </u>	1	L	1

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaar
			- Pemagaran Tanah Kuburan	Kp.Kawao	200m	Masyarakat Desa	2024	125,000,000	DDS
			- Pemagaran Tanah Kuburan	Kp.Pandelekan	250m	Masyarakat Desa	2024	135,000,000	DDS
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman ***)						
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Kawao	170m	Masyarakat Desa	2024	36,035,000	DDS
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Gardu Pasar		Masyarakat Desa	2024	27,010,000	DDS
i			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Wawuluh	120m	Masyarakat Desa	2024	31,285,000	DDS
		<u> </u>	- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Menes		Masyarakat Desa	2024	36,035,000	DDS
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Sidomulya		Masyarakat Desa	2024	23,685,000	DDS
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Bojong		Masyarakat Desa	2024	25,585,000	DDS
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp.Pandelekan		Masyarakat Desa	2024	41,001,500	DDS
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp.Wawuluh		Masyarakat Desa	2024	29,770,500	DDS
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp, Bojong		Masyarakat Desa	2024	369,669,100	DDS
		L	- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp. Menes		Masyarakat Desa	2024	73,169,200	DDS
		10	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)						
			- Pengadaan tempat Pembuangan Sampah	14 RT	42 unit	Masyarakat Desa	2024	100,000,000	220
- 1			- Pengadaan Gerobak Pembuangan Sampah	14 RT		Masyarakat Desa Masyarakat Desa	2024	120,000,000 16,800,000	DDS
		11	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			masyarakat Desa	2024	10,800,000	<u>פעע</u>
			- Pembuatan WEB Desa	Desa	1 Paket	Informasi dan Publikasi utk Masyarakat Desa	2024	33,055,000	DDS
		13	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan			masyaranat Desa			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			- Pelatihan Kelompok Tani	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2024	12,500,000	DDS
			- Pelatihan Kelompok Tani Budidaya	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2024	7,500,000	DDS
· · · · · · · · ·						Jumlah	Per Bidang 2	3,453,549,700	
- 1	mbinaan masyarakatan	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dli)						
			- Pembangunan Poskambling/Pos Ronda	14 RT	14 1111111 1	Kemamanan Masyarakat	2023		DDS
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)			Ands) at anal			
			- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Satlinmas Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Linmas Desa	2023	13,500,000	DDS
		3	[Pelatihan Kesiansiagaan/Tanggan Bencana Skala Lokal	Desa Warakas	1 Kemiatan	Ketua RT dan Perangkat Desa	2023	8,500,000	DDS

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa						
			- Kegiatan Perayaan HUT RI	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023		DDS
			- Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) Tingkat Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023	35,500,000	DDS
			Pembinaan TP PKK Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus TP PKK	2023	13,500,000	DDS
		5	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			1 0110		10,000,000	שנוט
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT/RW	2023	6,500,000	DDS
	4		- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Karang Taruna	2023	7,500,000	DDS
	<u> </u>	J	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus LPM	2023	7,500,000	DDS
	1						Per Bidang 3	92,500,000	
4	Pemberdayaan		Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Kepala Desa	2023	4,500,000	DDS
	Masyarakat		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Perangkat Desa	2023	7,500,000	DDS
		3	Peningkatan kapasitas BPD	BPD Desa	1 Kegiatan	Anggota BPD	2023	7,500,000	DDS
		<u> </u>	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masy. Perempuan	2023	8,500,000	DDS
		5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Warakas	1 Kegiatan	Anak di desa	2023	7,800,000	DDS
		6	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS
		7	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS
		8	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Warakas	l Kegiatan	Pengurus Bumdes	2023	7,500,000	DDS
	T					Jumlah	Per Bidang 4	60,900,000	
	Penanggulangan	1				Masyarakat yg		30,500,000	
	Bencana, darurat	1	Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak desa	Desa Warakas	1 Paket/Keg	terkena dampak	2023	334,800,000	DDS
	dan Mendesak	<u> </u>	Vii			bencana			
	lDesa		Kesiapsiagaan bencana desa	Desa Warakas	1 Paket/Keg	Masyarakat Desa	2023	15,000,000	DDS
		 .				Jumlah	Per Bidang 5	349,800,000	
						JUI	MLAH TOTAL	4,727,149,700	

Mengetahui Kepala Desa

ASMANI

Warakas, 27 September 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SAEFULLAH

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) PELAKSANAAN TAHUN KE-2 (DUA) TAHUN PELAKSANAAN RKPDES 2023

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang		Inda Maria	Lokasi	Perkiraan	Sasaran/	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan	Perkir	aan Pola Pe	laksanaan
	·		Jenis Kegiatan	(RT/RW/ Dusun)	Volume	Penerima Manfaat	Tahun ke-2	Sumber Pembiayaan	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
1.	Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Orang	Kepala Desa	V	APBDes/ADD	V	Desa	IIga
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	Desa	1 Orang	Sekretaris Desa	√	APBDes/ADD	1		
		3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	6 Orang	Perangkat Desa	V	APBDes/ADD	V		
		4	Operasional Pemerinatahan Desa	Desa	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	V		
-		5	Tunjangan BPD	Desa	7 Orang	Anggota BPD	V	APBDes/ADD	1		
		6	Operasional BPD (rapat-rapat,ATK, makan minum)	Desa	1 Paket	BPD	V	APBDes/ADD	٧		
		7	Insentif Ketua Rt dan Rw	Desa	18 orang	Ketua RT dan RW	V	APBDes	٧		***************************************
		8	Honorarium Tenaga Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	Desa	2 Orang	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	٧	APBDes	√		
			Honorarium Sopir Ambulance Desa	Desa	1 Orang	Sopir Ambulance	7	APBDes	V		, · ·
		10	Tunjangan Tambahan Kepala Desa	Desa	1 Orang	Kepala Desa	$\sqrt{}$	APBDes			
		11	Tunjangan Tambahan Sekretaris Desa	Desa	1 Orang	Sekretaris Desa	1	APBDes	√		
	<u> </u>	12	Tunjangan Tambahan Perangkat Desa	Desa	6 Orang	Perangkat Desa	V	APBDes	√		***************************************
			Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	8 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	APBDes	√		
			Honor Linmas	Desa	1 Paket	32 Orang	V	APBDes	$\overline{}$		
	-		Rehab Kantor Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa		APBDes	V		
		10	Pembangunan Gedung Karang Taruna Desa	Kantor Desa	1 Paket	Gedung Karang Taruna Desa		APBDes	1		
			Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	V		
		18	Penyusunan Profil Desa	Desa	1 Paket	Desa	V	APBDes	√		

No.	Ridana		Lock Wash	Lokasi	Perkiraan	Sasaran/	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan	Perkir	aan Pola Pe	laksanaan
110.	Bidang		Jenis Kegiatan	(RT/RW/ Dusun)	Volume	Penerima Manfaat	Tahun ke-2	Sumber Pembiayaan	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		19	Kearsipan Pemerintah Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√	Desa	- 11ga
		20	Perencanaan Desa / APBDes	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		21	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus Rembang Desa)	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	V		
		22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes,RKPDes)	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	1		
		23	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan Lpj DLL)	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	1	APBDes	1		
			Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	1	APBDes	V		
		25	Penyusunan Kebijakan Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa		APBDes			
		26	Penyusunan Laporan Desa, LPPDesa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	1	·	
		27	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	V		
			Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	1		
			Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontigen Dalam Lomba Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	٧	APBDes	1		
		30	Pengadaan, Pemeliharaan Tanah Kas Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
			Sertifikat Tanah Kas Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa		APBDes	7		
		32		Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa		APBDes	1		
		33	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat	,	APBDes	1		
		34	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes	√		
		35	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes	V		
			Penentuan Batas Tanah Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	7		
		\vdash									
2. Pe	embangunan	1	Pembangunan Jalan Desa (TPT)	Kp.Menes	200 Meter	Masyarakat		APBDes/DDS	- _V +		

NT-	Did			Lokasi	Perkiraan	Sasaran/	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan	Perkir	aan Pola Pe	laksanaan
No.			Jenis Kegiatan	(RT/RW/ Dusun)	Volume	Penerima Manfaat	Tahun ke-2	Sumber Pembiayaan	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
	Desa	2	Pembangunan Jalan Lingkungan (Perkerasan)	Kp. Sidomulya	500 Meter	240 KK	٧	APBDes/DDS	1	2004	
		3	Pembangunan Masjid	Desa Warakas	5 Unit	Masyarakat	√	APBD/APBN	***		V
		4	Pemeliharaan/Penataan Kantor Desa	Desa Warakas	1 Paket	Desa	√	APBDes/DDS	1		
		5	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Warakas	1 Paket	Desa	√	APBDes/DDS	1		
:		6	Pengelolaan Perpustakaan Mikik Desa (Pengadaan Buku Dan Honor)	Desa Warakas	1 Paket	Desa	V	APBDes/DDS	٧		
		7	Pengadaan Insentif Kelembagaan Desa	Desa Warakas	1 Paket	48 Orang	V	APBDes/DDS	1		
		8	Pembangunan Embung Milik Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	7	APBDes/DDS	- J	<u>-</u>	
		9	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	RW, 01,02,03,04	950 Buah	950 KK	V	APBDes	V		W. L.
		10	Pembangunan Jamban / MCK umum	RW, 01,02,03,04	16 Unit	Masyarakat	1	APBDes/DDS	√		
		11	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah	RW, 01,02,03,04	16 Unit	Masyarakat	√	APBDes/DDS	V		
		12	Pembangunan Pembuangan Limbah Rumah Tangga (IPAL)	RW, 01,02,03,04	16 Unit	Masyarakat	V	APBDes/DDS	√		
		13	Penerangan Jalan Umum (PJU)	RW, 01,02,03,04	80 Titik	Masyarakat	V	APBDes/DDS	٧		
		14	Pemberian Makanan Tabahan untuk Balita dan Ibu Hamil	Desa	1 Paket	Balita dan Ibu Hamil	V	APBDes/DDS	V		
		15	Penyuluhan Kesehatan Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes/DDS	V		
		16	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	Desa	1 Paket	Masyarakat	7	APBDes/DDS	√		
3.	Pembinaan		Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas								
J.		1	Tenaga Keamanan, Ketertiban Oleh Pemdes	Desa Warakas	32 Orang	32 Orang	√	APBDes	V		
		2	Pembinaan Keamanaan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	Desa Warakas	33 Orang	33 Orang	1	APBDes	V		
		3	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa Dan Masyarakat Miskin	Desa Warakas	60 Orang	60 Orang	√	APBDes	1		

				Lokasi	Perkiraan	Cacaran /	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan	Perkir	aan Pola Pe	aksanaan
No.	Bidang		Jenis Kegiatan	1 (RT/RW// 1	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun ke-2	Sumber Pembiayaan	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		4	Pelatihan, Penyuluhan, Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	1		
		5	Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	٧		
		6	Pengiriman Kontigen Group Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil)	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	٧		
		7	Penyelenggaraan Fastival Kesenian, Adat/ Budaya, Keagamaan (HUT RI, HARI RAYA KEAGAMAAN DLL)	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	٧	APBDes	V		
		8	Penggadaan Honor Pemandi Jenazah	Desa Warakas	28 Orang	28 Orang	1	APBDes	V		
		9	Penggadaan Honor Penggali Kubur	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	1	APBDes	V		
		10	Pengadaan Honor Guru Ngaji	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	V	APBDes	4		
		11	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Warakas	1 Paket	48 Orang	7	APBDes	V		
		12	Pembinaan Pemandi Jenazah	Desa Warakas	28 Orang	28 Orang	V	APBDes	1		
		13	Pembinaan Penggali Kubur	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	1	APBDes	V		
		14	Pembinaan Guru Ngaji	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	7	APBDes	1		-•
		15	Pengembangan Dan Pembinaan Sangar Seni	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	1	APBDes	1		
		16	Dukungan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	1	APBDes	V		
		17	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	1	APBDes	1		
		18	Penyuluhan Tentang Kenendudukan	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	V	APBDes	٧		
		19	Pembinaan Pengelola Perpusdes	Desa Warakas	5 Orang	5 Orang	1	APBDes	V		
		20	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Belita	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	V		

i ,

				Lokasi	Perkiraan	Sasaran/	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan	Perkira	aan Pola Pe	laksanaan
No.	Bidang		Jenis Kegiatan	(RT/RW/ Dusun)	Volume	Penerima Manfaat	Tahun ke-2	Sumber Pembiayaan	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		21	Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	٧	APBDes	7		
		22	Pelatihan/Penyuluhan Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	1		
-		23	Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	V	APBDes	√		
		24	Penyelenggaraan Pastival Kesenian	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	٧	APBDes	V		
			Pengiriman Kontigen Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	4	APBDes	1	······································	
		26	Penyelenggaraan Pelatihan Ke Pemudaaan	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	4	APBDes	1		***************************************
		27	Penyelenggaraan Pastifal Lomba Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	V	APBDes	1		
		28	Pengiriman Kontigen Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	7	APBDes	4		
		29	Pelatihan/Pembinaan Remaja	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	V	APBDes	1		
		30	Pembinaan Lansia	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	V	APBDes	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		31	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	V	APBDes	V		
		32	Pembentukan Dan Penbinaan Pos Binaan Terpadu (POSYANDU)	Desa Warakas	Kader Posyandu	Masyarakat	V	APBDes	1		
		33	Pembentukan Dan Pembinaan Pos Malaria Desa	Desa Warakas	Kader Posyandu	Masyarakat	4	APBDes	1		
		34	Pembentukan Dan Pembinaan Media Promosi Kesehatan (PROMKES)	Desa Warakas	Kader Posyandu	Masyarakat	٧	APBDes	V		
	Pemberdayaan Masyarakat	L	Pelatihan Kepemudan (Olahraga)	Desa Warakas	1 Paket	120 Org	√	APBDes	√		
		2	Bantuan Ternak Kambing	RTM	80 RTM	80 RTM	٧	APBDes	√		
		3	Pembangunan Ketahanan Pangan (Lumbung Desa)	Desa Warakas	1 Paket	Desa	٧	APBDes	1		
		4	Pelatihan/Bimtek Tepat Guna Untuk Pertanian, Peternakan, Dan Pertanian	Desa Warakas	6 Kelompok	6 Kelompok	1	APBDes	→		

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	n: L			Lokasi	Perkiraan	Sasaran/	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan	Perkir	aan Pola Pel	aksanaan
No.	Bidang	<u> </u>	Jenis Kegiatan	(RT/RW/ Dusun)	Volume	Penerima Manfaat	Tahun ke-2	Sumber Pembiayaan	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Warakas	10 Orang	Perangkat Desa	4	APBDes	√		
		6	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Warakas	5 Orang	Ketua dan Anggota BPD	٧	APBDes	V		
		7	Pembinaan dan Pelatihan TP.PKK Desa	Desa Warakas	16 Orang	Ketua dan Anggota TP,PKK Desa	1	APBDes	√		
		8	Pembinaan dan Pelatihan Ketua RT dan RW	Desa Warakas	19 orang	Ketua RT dan RW	√	APBDes	V		
		9	Pembinaan dan Pelatihan Keamanan Lingkungan (LINMAS)	Desa Warakas	32 Orang	Linmas	1	APBDes	1		
		10	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah Dan Koperasi	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	1		
		11	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Warakas	20 Orang	20 Orang	4	APBDes	V		
		12	Sosialisasi Pembuatan Pupuk Cair Organik / Pertanian Alami	Desa Warakas	20 Orang	20 Orang	√	APBDes	√		
		13	Pelatihan Kelompok Tani,Ternak Dan Wanita tani	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat	٧	APBDes	√		
		14	Pelatihan Kader Kesehatan	Desa Warakas	Kader Posyandu	Kader Posyandu	V	APBDes	٧	,	
				Desa Warakas	Posyandu	Nauer Fosyandu	V	ALRDES	V 		

Mengetahui : Kepala Desa,

<u>ASMANI</u>

Warakas,27 September 2022 Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa

SAEFULLAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TA.2023 dan DU RKPDes TA.2024

Dalam Rangka Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2024, di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Povinsi Banen Pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022 Jam : 13.00 Wib sd selesai Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 an DU RKPD dan es Tahun Anggaran 2024, yang Dihadiri oleh Nara Sumber, Ketua BPD dan Anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW, Ketus LPM dan Anggota, Ketua TP.PKK Desa dan Anggota, Ketua Kader Posyandu dan Anggota, Ketua Karang Taruna dan Anggota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Se Desa Warakas Sebagaimana Terlampir dalam Daftar Hadir.

Materi atau Tofik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan Narasumber adalah;

A. Materi atau Tofik

"Musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 dan DU RKPDes Tahun 2024"

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah: MAMAN Fdari Ketua BPDNotulen: ROHMATdari Sekretaris BPDNarasumber: 1. ASMANIdari Kepala Desa

2. H Tajudin dari Kecamatan Binuang3. Agus Rodif dari PD Kecamatan Binuang

Telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 an DU RKPD dan es Tahun Anggaran 2024 Terhadap Materi dan Tofik diatas Selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Pembinaan Kepala Desa

or

Warakas, 25 Agustus 2022 Notulen/Sekretaris

ROHMAT

Perwakilan Musdes yang Hadir

Wakil Masyarakat 1. H. WAUP	Tanda Tangan 1	Mr. I.
2 Ispaul Hayati 3 KAMTARI	3\dy	2
4. ASNEW	5	4

NOTULEN

MUSYAWARAH DESA

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) TA 2023 dan DU RKPDes TA 2024

	adulation - Sam Butan
	Kesala Dusa Warners (Asmany)
***********	- Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Para Lindangan Rkp Dis th. 2023 atas Kehadirannya di alaba Mustus
***********	Judangan Ekf Dis Kh. 2023 atas Kehbaliannya
	po occor is 1100 (pes
	- Menghimbar Kepada Ketua RT/RN with mengante
•	Wenten-usulan di trap wilayah maring-mais
	- Menghimbau Kepada Ketua RT/RN WHK mengajuta Wantan-usulan di tiap wilayah maring-marin dalam musdus RKPDes th 2023 Dan Du RKP Des E
	Anggaran 2024
····	Ketua BPD (H:MAMAN F)
•••••	
••••••	- Membangun Sinergi antar BPD dan pemerintal
	Developed and the state of the
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Demberdayaan masyaratat yang di danai oleh
*****	permerintan Desa bordasartan inggawarah shuga
********	- Fepola Desa harus bijak dalam penentuan / pelaksa
	Dembangunan di desa supaya merata.
.3:()	Dema paran Hari Sumber Ket-Binuang
············	- Mus des Rkf Des adalah pencana kena pemerin Desa dengan dokumen penjabaran dari Resmo
	Desa dengan dokumen penjabaran dari RPIMD
***********	Desp wordkas until Periode 1 tahun
	- Adapun tuyuan di Cakukannya RKPDes mi ad
	ter wynd ma perencanaan Fahunan Desa Worn
	Latam upaya ter wyud nya rencana pembang
**********	panyka menengah Daa dan menertikan admi
***********	I Dea
************	Turner Danieles Decons
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Tuyvan Musder Rkp Des adalah untuk Mene turan kebijakan Bonje Bidang pemerintahan, Bidang pembangunan desa pamberdayaan massimokat
	Turan cerifaran Baya Gracing remerintanan,
	groung pembangunan desa pombirdayaan
***********	mainfardkat.
•••••	
•••••	- Adapur hairi dari Murdes Ptp Des ini dalam
	nerry minam Kel Des 16 2023
	1. pembentukan tim penyusun Rkp Des 2. pencermatan dan penyelarasan rencana
•••••	2. Dencermatan dan nemelarasan rencana
	Elg laton dan nempirantan nembaranan hara
	2. Mencer mateur ellars Poten non nova umakas
	2 pencer majon illang Rogn Des Desa worakas 4 Murdes pumbahacan dan pengerahan Repoes dan
************	Du rup ou the 2029
***********	10 1997 KX EVIII 2014
•••••••	5. Mus ren bang Des - Dembahasan rencana PEPDES, Pember Kasan Lan Du PEPDES thin 2024
	runger casan from In lifether the 2024

Notulen/Sekretaris

Alluhammad Anas

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TA. 2023

dan DU RKPDes Tahun Anggaran 2024

Tanggal Jam Tempat

: 25 Agustus 2022 : 13.00 WIB

: Kantor Desa Warakas

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/	TANDAT	FANCAN
				UNSUR	TANDA T	IANGAN
1	Saefullah	1	19. Kawas	sekde c	1 4	2 1/1
2	KAMTARI	1 -	14. KAWAO	LW 01	- 60	- WZ
3	Ispaul Hayati	P	Kp. Kawao	KH. per	3 /24 1	4 1
4	diding	L	11	Ket. Lpm	(UK Lea)	4 6
5	H.Jesan	1	19. Wawoluh.	Ker. Rwoog	25 00	· C ·
6	Cecep Mul Jadi	<u> </u>	ke. Mones	Kesua Rw.09		° Jaw
7	SUKTI	1	KI. Kawao	Kerva Rrog	7C-M	°
8	DeDe 1: JunaiDi	L	KP. MENES	Ketua RTOI	Ser	°Dele
9	AMIR	1	4. WaWULUL	KETUA RTO		10 🙆 🙃
10	AHMAD SYADOLI	L	pandelikan	Kerua Bros	721 Z.X. 1 / C. 1.	1012
11	Pian	L	Wawoluh	KELUA RTOZ		10 1 0 -
12	SamBoni	L_	M. Blyuka	Ketua RT02	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	12 8 x 2
13	ASNON	1	up. Kawao			. 1
14	H. KamaD	L	K. P. panddim	KOTUR RYOM	10/27	14 X/2
15	Saliman	1	up wawill	Ketua RTM		
16	Sarimin	1	lep. Sido nory	LICATUM RTOIZ	15 44	68
17	ASPURI	レ	PANTELEKAN	Keeua ATOE		- V
18	Barhooin	V	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AN Soig (LPM)		80×1-4
19	ABUL Whas	4	"	ANGG I ON	A	
20	Rostan	L	11	Ketua RT	19 2	Rog
21	HUMaio:	4	1/	Schetaris LPM		<u> </u>
22	ABOUL WahaB	L	11	BencaharLm	21 0 2	2 J&A
23	ALI DDIN	し	11	AN GGUTALPM	7)	11.
24	Muhammad Ame	1	Ho. Kruno	App Dera	28 Alax 21	4 Spar 2
25	IPPAN SAHDONI	L	u	The Comment		1
26	Diyen Purwanti	P	Dandelekan	Kader &	25 Per 21	6
27	Windh	p	Dandelekan	2000	4 /	<u> </u>
28	DOHMATULLOH		NAWULUH	E Di	27 1 1 28	Dant
29	11mi-m	U	Isp. menes	Prangkat desa	_ \v ·	7
30	+-WALIR	1	KAWAO	Marca	29-/2 30) k
31	A. Rifai	1_	Fawas	MARGA ANDRY	10 -	7
32	AS MANU	L	"	Kades	31 X hu 32	m-
33	NASVKI	L	KAWAO	Brd		
34	MARNAN	-	Sidamulya		33 - 18-34	41/
35	Dewp	ğ	KI.KAWAO	Masycirabal	000	0
36	YUNUS	7	KI KAWAO		36	83
37	MIRAN		MENES	" O		1
38	MULIVAH	0	FAWAU		38 mg 2. 38	The
39	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7		7	10-4. q.	(V)
40	SALWAN	- √	Kawao V Kawao	<u>kader</u> 3	9 Cuff 40	300
	-/1040/144	<u></u>	KP. KWAO		<u>~ </u>	





NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA	TANGAN
41	ABOUL SUKUR	L	69.5100 MULL	Kasi Pem	NA	1
42	Aprudin	L	Binniana	Kas Trankih	41	12 /W/
43	Suffrigais	l	Boymen	Warne		17
44	KARMEN	L	KP.Menes	warga	43	44 PL 1
45	Yudin	し	KP. Sidomulya	Warga	5	1
46	Kusen	L.	KP. MENES	Warga	45/	46
47	IMAYA		KP. BIYUW	Ket. Pemuda	-1/	
48	JISAh	P	KP. Sidomulya	Klt. Pemuda Kader Posyand	47 M	48
49	RUSMANA	با	KD. Sidomulya	torch Agama		
50	Aldi	l	Ke. KAWAO	Penruda	49 James	50 Mm

Mengetahui, Kepala Desa ASMANI Warakas, 25 Agustus 2022 NOTULEN

ROHMATULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS Nomor: 410/21/BPD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu
 - bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094):
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569):
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
- 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
- 23. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 2027;
- 24. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan

: Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana

- 1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Dokumen Laporan Kepala Desa tentang realisasi RKP Desa
 - b. Dokumen pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. Daftar tabel aspirasi masyarakat.
- 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes perencanaan pembangunan tahunan;
- 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
- 4. Menyiapkan daftar hadir;
- 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
- 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes:
- 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2023

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Warakas Pada tanggal : 21 September 2022

KETUA BPD WARAKAS,

MAMAN.F

LAMPIRAN: Keputusan BPD Warakas

Nomor : 410/21/BPD/2022 Tanggal : 21 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ASMANI	Pembina	Kepala Desa
2.	MAMAN F	Ketua	Ketua BPD
3.	JISAH	Sekretaris	Kader posyandu
4.	ABDUK SUKUR	Anggota	Perangkat Desa
5.	ABDUL WAAHAB	Anggota	LPM
6.	M.TOHIR	Anggota	Anggota BPD
7.	ROHIM	Anggota	Tokoh Masyarakat

KETUA BPD WARAKAS

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG TAHUN 2023

Pada Hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Warakas, Kami Pemerintah Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Telah Menyelenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Dengan Hasil Sebagai Berikut

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 Jam : 08.00 Wib sd selesai

Tempat : Kantor Desa

1 Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dengan Susunan Keanggotaan

a. Pembina : Kepala Desa Warakas

b. Ketua : Saefullah c. Sekretaris : Diding

d. Anggota : 1. Muhammad Anas

Herman
 Rohmatullah
 Ispaul Hayati
 Cecep Mulyadi

2 Susunan Keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Sebagaimana dimaksud diatas, Selanjutnya Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini Dibuat dengan Sebenarnya.

PIMPINAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

Mengetahui, Kepala Desa

<u>ASMANI</u>

Warakas, 29 Agustus 2022 Pimpinan Musyawarah

MAMAN F

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN **RKP DESA TAHUN 2023**

Tanggal

: 29 Agustus 2022 : 08.00 WIB

Jam

Tempat

: Kantor Desa Warakas

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA	TANGAN
1	CECE Mulyadi	L	Menes	RW 04	1 0	2011
2	Ispaul Hayati	ρ	kp. kawau	Kader	- Du	Mal
3	KAMTARI	l	KAWAO	RWOI	3 1 /	4
4	diding	1	Kawao	Kel LPM	M	1 Del
5	H. Jesan	し	Pandelekan	RW-02	5000	60 10
6	SUKCI	しし	'Wawao	Rt 09	the	790
7	ASPURI	L	BOJONG	RT-08	7 1 9	8 C T
8	Rastan	し	Dandelekan	Rt. OII	Fry	EM
9	KARYA	L	M. WawuwH	Stag Desa	9 1	10 GM
10	Muhammad Anas	し	Kawao	perangkal de so	Jud	8/19
11	JIMI.M	L	KP. MENTS	Prangk at lex	11	12 1/2 -
12	IRDAN SAMPONI	<u>L</u>	kp. Menes	Perampat Desa		12 fai
13	ASNEN	し	KAWAO	RT013	13/	14 Am
14	Diyen Purwanti	P	pandelekan	Kader		8
15	Minah	P	pandeletan	BRO	15	16/0
16	Supiyan	Ĺ	Walrulutt	03	Jun	Ga-
17	Saranan	し	Cielamulya	\$24 03	17 Jan	18
18	m. syarler	し	Dandelekan	Rt 05/03	KM	1744
19	KOHMATULLOH	し	Walrulut	210	19.1	20 0
20	Carimin	l	Silamulya	Pt 12	Kmar	CAMOS
21	SAEFULAH	L	Cawao	रस्फार ८	21 42	22 /11
22	Asmani	L	h	Kades		/ V''
23					23	24
24					-	
25			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25	26
26						

Warakas, 24 Agustus 2022



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG NOMOR: 141.1/016/Kep.Ds 2005/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA WARAKAS,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes pasal 33 ayat 1 Permendagri 114 tahun 2014;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2023);

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

7.Peraturan.....

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
- 15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
- 16. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
- 17. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun

2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023

berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan

Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri

No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan

Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan

Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Keempat : Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan

dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan

(kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat

Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Desa (Perdes) tentang RKPDesa Tahun 2023 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warakas

Pada Tanggal 29 Agustus 2022

KEPALA DESA WARAKAS

ASMAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa WARAKAS

Nomor : 141.1/016/Kep.Ds 2005/2022

Tentang: Pembentukan Tim Penyusuan RKPDesa

Tahun 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

No.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	UNSUR
1	ASMANI	_{[!} Pembina	Kepala Desa
2	SAEFULLAH	Ketua	Sekretaris Desa
3	DIDING	Sekretaris	Ketua LPM
4	M. ANAS	Anggota	Perangkat Desa
5	HERMAN	Anggota	Ketua Karang Taruna
6	ROHMATULLAH	Anggota	Anggota BPD
7	ISPAUL HAYATI	Anggota	Perwakilan Perempuan
8	CECEP MULYADI	Anggota	Ket. RW 004

KEPALA DESA WARAKAS

BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN ANGGRAN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022 Jam : 08.00 Wib sd selesai Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah diselesaikan Penyusunan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda Kegiatan yang dilakukan dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah Sebagai Berikut;

- 1. Terselesaikannya Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
- 2. Diserahkannya rancangan RKP Desa Kepada Kepala Desa
- 3. Kepala Desa Menyepakati dan Menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023
- 4. Kepala Desa akan segera menggelar Musrembang Desa

Hasil Kegiatan Berupa Rancangan RKP Desa Sebagaimana Terlampir Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Mengetahui, Kepala Desa

Warakas, 31 Agustus 2022 Pimpinan Musyawarah

SAEFULLAH

BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA **TAHUN ANGGRAN 2023**

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Warakas

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022 **Tam** : 08.00 Wib sd selesai Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah diadakan Kegiatan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa), yang telah dihadiri Oleh Wakil wakil RT/RW dan Tokoh Masyarakat, Serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana Tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber dalam Membahas Kegiatan Musrembang Desa adalah

A Materi

- 1. Pembahasan Rancangan RKP Desa
- 2. Peningkatan Prioritas Kegiatan Perbidang dan
- 3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa
- Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : MAMAN F Notulen : SAEFULLAH Narasumber : 1. ASMANI

> 2. AGUS RODIF H 3. H. TAJUDIN

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi, Selanjutnya Seluruh Peserta Musyawarah menyepakati beberapa Hal yang berketetapan menjadi Kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa vaitu;

- 1. Menyepakati hasil Rencana RKPDes Tahun 2023
- 2. Menyepakati Peringkat Prioritas Kegiatan Perbidang
- 3. Menyepakati Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2023
- 4. RKPDes yang disepakati selanjutnya akan dituangkan ke Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun Anggaran 2023

Hasil Kegiatan Berupa Rancangan RKP Desa Sebagaimana Terlampir Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Warakas, 31 Agustus 2022 Kepala Desa Pimpinan Musyawarah Mengetahui dan Menyetujui, Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSDES) TENTANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal

: Rabu, 31 Agustus 2022

Jam

: 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: Kantor Desa Warakas

Kehadiran

: Laki-laki = ...31..... orang

Perempuan =7..... orang

Susunan Acara

: 1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD.

3. Sambutan Kepala Desa Warakas

4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa

Tahun Anggaran 2023.

5. Penutup.

Pimpinan Rapat :

Ketua BPD Desa Warakas

Uraian Jalannya Rapat:

- 1. Pembukaan.
- 2. Sambutan Ketua BPD (MAMAN F)
- 3. Sambutan Kepala Desa (ASMANI)
- 4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
- 5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat: Menyepakati Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- 1. Pembaharasan dan Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 telah disepakati danPimpinan Rapat,
- 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 selanjutanya akan di tugaskan untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2023.

Warakas, 31 Agustus 2022

Sekretaris Rapat,

Pimpinan Rapat,

M**A**MAN F

MUHAMMAD ANAS

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANG DESA) RKP DESA TAHUN 2023

Tanggal

: 31 Agustus 2022 : 08.00 WIB

Jam

Tempat

: Kantor Desa Warakas

1 AS MANNI 2 SAEPURAN 2 SAEPURAN 3 FARYA L KP. WADON SORDER 3 FARYA L KP. WADON RADER 4 JULIYAH P KP. KWADO RADER 5 ABDUR SYNKION L WAWUULH GPD 6 JESAH P KR. KAWAO MAYARARAF AWE 6 JESAH P KR. KAWAO MAYARARAF AWE 7 MILHAMAMA L KAWAO MAYARARAF AWE 8 MINAH P MANNICHAM 10 DIDINAS L KAWAO BPD 11 NASUKI L KWAO BPD 12 ISPAUI HAYACI P KA WAWAO KARIF 13 DIYUN PUWANTI P KA WAWAO KARIF 14 Sahjeni L KY BIYUKU MAYARARAF 13 JE 14 JE 15 JISAH P MENES POSYANDU 15 JA 16 JA 16 M. ANIAT L BOJON G KARANGT 15 JA 16 JA 17 JENAL K L KY KUMO TALUNA 17 JA 18 JE 18 H. WALLE L KY KOMO TOMMAS 20 MINAN L KY MENES MAYARAFA 19 JA 20 Q 21 ACED L ICP KAWAO TOMMAS 22 SAEPURIN L KY MENES MAYARAFA 19 JA 20 Q 23 KAMARANGON L KAWAO RUO 1 24 CECER MUYAOL L KY MENES MAYARAFA 19 JA 20 Q 25 ASPURI L KAWAO RUO 1 26 ROSTAM L RAWAO RUO 1 27 GURANAR L KAWAO RUO 1 28 ASPURI L KAWAO RUO 1 29 KAMARI L KAWAO RUO 1 20 MINAN L KAWAO RUO 1 20 KAMARI L KAWAO RUO 1 21 ACED L INGRAS RUO 04 22 SAEPURI L KAWAO RUO 1 23 KAMARI L KAWAO RUO 1 24 CECER MUYAOL L KAWAO RUO 1 25 ASPURI L KAWAO RUO 2 26 ROSTAM L PANABERS RUO 04 27 GURAN L KAWAO ROO 22 JULI 26 GAMANA 10 28 A PIRA L KAWAO ROO 22 JULI 26 GAMANA 10 29 HAMAR L KAWAO ROO 22 JULI 30 ZI	NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA	TANGAN
2 Saepulah 1 Lef. Pandduen Seeder 4 JULIYAH 4 KRWAD KADER 5 Abdul Syukion 6 JESAH 7 Muhammud Mus L Kawao Repe Den 7 Muhammud Mus L Kawao Repe Den 8 WINAH 9 Mannad L Menes Staff 9 Jian muhamad L Menes Staff 10 DIDING L KAMAO LPM 11 NASUKI L KWAO BPD 12 Ispani Hayati P KR KAWAO KADER 13 Digen Purwanti P KR Wawao Kader 14 Sahjeni L KR HORAO LPM 15 JISAH P MENES POSYANDU 16 M. ANIAT L BOJON G KARANGT TOKASANGT 17 JENAL A. L KRAWAO TARUNA 18 H. WALLE L KRAWAO TARUNA 19 WEDAN SANDON 10 WEDAN SANDON 11 LEP KAWAO TOKASANGT 12 Saepulin L 12 KRAWAO TOKASANGT 13 WEDAN SANDON 14 LEP KAWAO TOKASANGT 15 WEDAN SANDON 16 M. ANIAT L BOJON G KARANGT 17 JENAL A. L LEP KAWAO TOKASANGT 18 H. WALLE 19 WEDAN SANDON 10 KRAWAO TOKASANGT 11 LEP KAWAO TOKASANGT 11 LEP KAWAO TOKASANGT 12 LEP KAWAO TOKASANGT 12 LEP KAWAO TOKASANGT 13 WEDAN SANDON 14 LEP KAWAO RUO 15 ACG. 16 M. ANIAT 17 LE BOJONG RUO 18 ACG. 18 LEP KAWAO RUO 20 ANIAN 19 WEDAN SANDON 10 LEP KAWAO RUO 21 ACG. 22 Saepulin L 23 KAMTARI L KAWAO RUO 24 CECER MULYAOL L KAWAO RUO 25 ASPUPA L BOJONG RT II 26 ROSTAM L PAUGAGROUN RT II 27 SUKCH L KAWAO RT OS 38 A. PIFAH L KAWAO ROU 28 A. PIFAH L KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 Haminah P KAWAO ROU 29 HAMINA L KAWAO ROU 29 HAMINACH L KAWAO ROU 29 HAMINACH L KAWAO ROU 29 HAMINACH L KAWAO ROU 29 HAMINACH L KAWAO ROU 20 MINAN L KAWAO WAZGOO 30 MANNA L KAWAO WAZGOO 31 MANNA L KAWAO WAZGOO 32 JUKRA L KAWAO WAZGOO 33 JOOKAN L KAWAO WAZGOO 34 OALIMAN L KAWAO WAZGOO 35 JUKRA L KAWAO WAZGOO 36 ASNEN L KAWAO WAZGOO 37 JALIYA SAMAO 39 JOOKAN L KAWAO WAZGOO 30 MANNA L KAWAO WAZGOO 31 MANNA L KAWAO WAZGOO 32 JUKRA L KAWAO WAZGOO 33 JOOKAN L KAWAO WAZGOO 34 OALIMAN L KAWAO WAZGOO 35 JOOKAN L KAWAO WAZGOO 36 JOOKAN L KAWAO WAZGOO 37 JALIYA	1	ASMANI	し	Ki. Kawao	KADES	. 1	SALAS
4 JULYAH 5 Abdul Syukton L WAWUUH 6 JESAH P KR KAWAO MASYARIATI 7 MUHAMMA MAN L KAWAO MASYARIATI 8 WINAH P PANDELFIAM BHO 9 JIMI MUHAMA L KAWAO BAD 10 BK 10 DIDING L KAWAO BAD 11 TV 12 Ohios 11 NASUKI L KWAO BAD 11 TV 12 Ohios 12 Ispani Hayati P KR KAWAO KAGUT 13 DIYEN PUWANTI P KR WAWAO KAGUT 14 Sahjeni L KY BYUKU MASYARATA 15 JISAH P MENES POSYANDU 15 TA 16 A 16 M ANIAT L BOJONG KARANIGT 15 TA 16 A 17 JENAL A L KRAWAO TAKUNA 17 CHN 18 A 18 H. WALIR L KRAWAO TOKMAS 19 KRAN SAMBONI 19 KRAN SAMBONI 20 MIMAN L KRAWAO RWOJ 21 ACY. L ICP KAWAO RWOJ 22 SAEPUBIO 23 KAMTARI L KAWAO RWOJ 24 CECEP MULYOOT L MARGALLAM RWOJ 25 ASYULI L ROWAO RWOJ 26 ROSTAM L ROWAD RWOJ 27 SUKU L KAWAO RWOJ 28 A. RIFAI L KAWAO RWOJ 29 HAM NACL L MARANIGT ROWOJ 20 KASTAM L PANDARICA RWOJ 21 ASYULI L KAWAO RWOJ 22 SAEPUBIO L MARANIGT RWOJ 23 KAMTARI L KAWAO RWOJ 24 CECEP MULYOOT L MARANIGT RWOJ 25 ASYULI L KAWAO RWOJ 26 ROSTAM L ROWAD RWOJ 27 SUKU L KAWAO RWOJ 28 A. RIFAI L KAWAO RWOJ 29 HAM NACL L KAWAO RWOJ 20 MAMARI L ROWAD RWOJ 21 ASYULI L ROWAD RWOJ 22 SAEPUBIO L MARANIGT RT III 23 KAMTARI L ROWAD RWOJ 24 CECEP MULYOOT L MARANIGT RT III 25 ASYULI L ROWAD RWOJ 26 ROSTAM L ROWAD RWOJ 27 SUKU L KAWAO RWOJ 28 A. RIFAI L KAWAO RWOJ 29 HAM NACL L ROWAD RWOJ 30 SAEWAN L ROWAD RWOJ 31 M.A. M.R. L ROWAD RWOJ 32 SAEWAL L ROWAD RWOJ 33 JEDIR L KAWAO WARONOG RWOJ 34 ALIMON L ROWAD WARONOG RWOJ 35 SAIP ALIMON L KAWAO WARONOG RWOJ 36 ASNEN L ROWAD WARONOG ROWAD RWOJ 37 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 38 OAFININ L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 30 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 31 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 32 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 33 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 34 JADIR RWOJ 35 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 36 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 37 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 38 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 30 JADIR L KAWAO WARONOG RWO	2		L	101. Pandeluer		1/10	2 \$70.5
4 JULYAH 5 Abdul Syukton L WAWUUH 6 JESAH P KR KAWAO MASYARIATI 7 MUHAMMA MAN L KAWAO MASYARIATI 8 WINAH P PANDELFIAM BHO 9 JIMI MUHAMA L KAWAO BAD 10 BK 10 DIDING L KAWAO BAD 11 TV 12 Ohios 11 NASUKI L KWAO BAD 11 TV 12 Ohios 12 Ispani Hayati P KR KAWAO KAGUT 13 DIYEN PUWANTI P KR WAWAO KAGUT 14 Sahjeni L KY BYUKU MASYARATA 15 JISAH P MENES POSYANDU 15 TA 16 A 16 M ANIAT L BOJONG KARANIGT 15 TA 16 A 17 JENAL A L KRAWAO TAKUNA 17 CHN 18 A 18 H. WALIR L KRAWAO TOKMAS 19 KRAN SAMBONI 19 KRAN SAMBONI 20 MIMAN L KRAWAO RWOJ 21 ACY. L ICP KAWAO RWOJ 22 SAEPUBIO 23 KAMTARI L KAWAO RWOJ 24 CECEP MULYOOT L MARGALLAM RWOJ 25 ASYULI L ROWAO RWOJ 26 ROSTAM L ROWAD RWOJ 27 SUKU L KAWAO RWOJ 28 A. RIFAI L KAWAO RWOJ 29 HAM NACL L MARANIGT ROWOJ 20 KASTAM L PANDARICA RWOJ 21 ASYULI L KAWAO RWOJ 22 SAEPUBIO L MARANIGT RWOJ 23 KAMTARI L KAWAO RWOJ 24 CECEP MULYOOT L MARANIGT RWOJ 25 ASYULI L KAWAO RWOJ 26 ROSTAM L ROWAD RWOJ 27 SUKU L KAWAO RWOJ 28 A. RIFAI L KAWAO RWOJ 29 HAM NACL L KAWAO RWOJ 20 MAMARI L ROWAD RWOJ 21 ASYULI L ROWAD RWOJ 22 SAEPUBIO L MARANIGT RT III 23 KAMTARI L ROWAD RWOJ 24 CECEP MULYOOT L MARANIGT RT III 25 ASYULI L ROWAD RWOJ 26 ROSTAM L ROWAD RWOJ 27 SUKU L KAWAO RWOJ 28 A. RIFAI L KAWAO RWOJ 29 HAM NACL L ROWAD RWOJ 30 SAEWAN L ROWAD RWOJ 31 M.A. M.R. L ROWAD RWOJ 32 SAEWAL L ROWAD RWOJ 33 JEDIR L KAWAO WARONOG RWOJ 34 ALIMON L ROWAD WARONOG RWOJ 35 SAIP ALIMON L KAWAO WARONOG RWOJ 36 ASNEN L ROWAD WARONOG ROWAD RWOJ 37 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 38 OAFININ L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 30 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 31 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 32 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 33 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 34 JADIR RWOJ 35 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 36 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 37 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 38 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 39 JADIR L KAWAO WARONOG RWOJ 30 JADIR L KAWAO WARONOG RWO	3.	Karya	L	Fe. Wawsluh.	Parder.	- (4)	1. 1/2
5 Abdul Syukion L WAWWILLH GPD 6 JESAH P KR KAWAO. MRYANIKAT AZ 6 D- 7 MUHAMMAN MA L JCANTO ROPE Parm 8 WINAH P PAMOELETAN BAD TOWNS 10 DIDING L KAWAO LPM 11 NASUKI L KWAO BPD 11 VASUKI L KWAO BPD 11 VASUKI L KWAO BPD 12 ISPAULHAYELI P KY. WAWWILL WAGET 13 DIYEN PUWANTI P KY. WAWWILL WAGET 14 BAJICHI L KY. BYIKU MAKYATAKAT 15 JISAH P MENES POYANDU 15 JA 16 A 16 M. ANIAT L BOJON G KAKANGT 17 JA 16 A 17 JENKL K. L KY. KAWAO TOKNAS 19 KRAN SANDON L KY. KAWAO TOKNAS 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES 19 KRAN SANDON L KY. MENES MAKYATAKAT 19 KRAN SANDON L KY. MENES 20 MINAN L KY. MENES MAKYATAKAT 21 ACLP. L KY. MANO NO. 22 JULI 24 COLOR 22 KAMARI L KAWAO RV. O1 23 KAMARI L KAWAO RV. O1 24 CECEP MULYAPAT L KAWAO RV. O1 25 ASPUPA L BOADONG RT. O1 26 R. ASTAM L PAWAO RV. O1 27 G. WACH L KAWAO RT. O1 30 SANDON L KAWAO RT. O1 31 M. ADIM L KAWAO RT. O1 32 JULI L KAWAO RT. O1 33 JULI JULIAN WAND 34 ALIMAN L PAWAO RT. O1 35 JULI JULIAN WAND 36 ASNEW L KAWAO WACANO 37 JULIAN WAND 38 JULIAN RT. L KAWAO WACANO 39 JULIAN RT. O1 39 JULIAN RT. L KAWAO WACANO 39 JULIAN L KAWAO WACANO 39 JULIAN L KAWAO WACANO 30 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. L KAWAO WACANO 30 JULIAN RT. O1 31 M. ADIM L KAWAO WACANO 32 JULIAN RT. O1 33 JULIAN L KAWAO WACANO 34 JULIAN RT. L KAWAO WACANO 35 JULIAN L KAWAO WACANO 36 ASNEM L KAWAO WACANO 37 JULIAN L KAWAO WACANO 38 JULIAN L KAWAO WACANO 39 JULIAN RT. O1 39 JULIAN L KAWAO WACANO 39 JULIAN RT. O1 39 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. L KAWAO WACANO 39 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. O1 31 JULIAN RT. O1 32 JULIAN RT. O1 34 JULIAN RT. O1 35 JULIAN RT. O1 36 JULIAN RT. O1 37 JULIAN RT. O1 38 JULIAN RT. O1 39 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. O1 30 JULIAN RT. O1 31 J	4		P			3 1	14 Jh
6 JESAH 7 Myhammad Man L (caumo Prof Dem 7 Myhammad Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 7 Myhammad L (caumo Prof Dem 11 Myhammad L (caumo Le Myhammad L (caumo Prof Dem 11 Myhammad L (caumo Prof Dem 11 Myhammad L (caumo Prof Dem 11 Myhammad L (caumo Prof Dem 11 Myhammad L (caumo Prof Dem 11 Myhammad L (caumo Prof Dem 12 Myhammad L (caumo Prof Dem 13 Myhammad L (caumo Prof Dem 14 Myhammad Prof Dem 14 Myhammad	5	Abdul Syukton	L	WAWULUH	T	- An-	<u></u>
MUNAT P DANDELFAM BPD 7 July 8 thm 9 Juni muhamad L Menes Staff 9 10 BK 10 DIDING L KNOO LPM 11 TW 12 BL 11 NASUKI L KWAO LPM 11 TW 12 BL 12 Ispaul Hayati P KI Waudukh Kadur 13 BL 14 LE 13 Diyen PUWANTI P KI Waudukh Kadur 13 BL 14 LE 15 JISAH P MENES POSYANDU 15 TA 16 BL 16 M ANIAT L BOIDN G KARANGT 15 TA 16 BL 17 JENAL A: L KI KAWAO TARUNA 17 TA 18 H. WALIR L KIP KUBO TOKNOS 10 LEP KAWAO TOKNOS 12 TA 19 LEP KAWAO TOKNOS 12 TA 19 LEP KAWAO TOKNOS 12 TA 19 LEP KAWAO RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L KIP MENES MAGNARAM 12 TA 19 LEP KAWAO RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L KIP MENES MAGNARAM 12 TA 19 LEP KAWAO RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L KAWAO RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 23 WILL 24 COLOR MINAN L ROMAN RUVOI 25 ASPUBLI L ROMAN RUVOI 25 ASPUBLI L ROMAN RUVOI 26 RASTAM L ROMAN RUVOI 26 RASTAM L ROMAN RUVOI 26 RASTAM L ROMAN RUVOI 27 GLA BAMAN RUTON RUT	6	JESAH	P	KI KAWAO.		5 FK =	6
8 WINAT P PANDELETAR BAD SUM 9 JIMI MUHAMAD L MENES STAFF 10 DIDINIS L KABBAO L PM 11 WASUKI L KWAO BPD 11 L Spaul Hayati P KA KABAO KABUT 12 Ispaul Hayati P KA KABAO KABUT 13 DIYEN PUWANTI P KA WAWAWA KABUT 14 SAHLEN L KP. BIYUKU MAKYATAKAT 15 JISAH P MENES POSYANDU 16 M. ANIAT L BOIDN G KAKANGT 15 JA 16 JA 17 JENKL A. L KA KAWAO TARUNA 17 JAN 18 H. WALIR L KA MADO TOWNAS 19 IKOMAN SAMBONI L KA MENES MAKYATAKAT 19 IKOMAN SAMBONI L KA MENES MAKYATAKAT 20 MINAN L KA MENES MAKYATAKAT 21 ACEP. L ICP KAWAO RW 01 22 SAEPUBIN L "" 22 SAEPUBIN L "" 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 24 CECEP MUYADI L MENES RU 04 25 ASPUBA L BOSONG RT 08 26 RASTAM L PANDAGERAM RT 11 27 SUKRI L KAWAO RT 11 28 ASPUBA L KAWAO RT 11 29 HAN NAH L KAWAO RT 11 20 HAN NAH L PANDAGERAM RT 11 20 HAN NAH L PANDAGERAM RT 11 21 ASPUBA L KAWAO RT 05 22 ASPUBA L KAWAO RT 05 23 WARI L KAWAO RT 06 34 ASPUBA L KAWAO RT 06 35 GARWAN L KAWAO RT 06 36 GARWAN L KAWAO RT 06 37 JADIR L KAWAO WARONGO 31 CHYMY 32 38 SUMMAN L KAWAO WARONGO 31 CHYMY 32 39 SUKRA L KAWAO WARONGO 35 GAP 36 39 SAFININ L KAWAO WARONGO 35 GAP 36 39 SAFININ L KAWAO WARONGO 35 GAP 36 39 SAFININ L KAWAO WARONGO 37 JAN 38 CMT	7	Muhammad Anas	L	Kawao		7/11/8	0.44
10 DIDING 11 NASUKI L KAMAO LPM 12 Ispaul Hayati P KI. Wadoo Kadur 13 Diyen purwanti P KI. Waddish Watur 13 Diyen purwanti P KI. Waddish Watur 14 Sahjeni L KY. Biyuku Makyarakat 15 7/5AH P MENES POSYANDU 15 M. ANIAT L BOIDNG KARANGT 17 JENKLA. L KI. KAWAO TATUNA 18 H. WALIR L KI. KAWAO TOMMAS 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KI. MENES Makyarakat 19 IRDAN SANDON L KAWAO ROU 20 MINAN L KAWAO ROU 21 ACEP L KAWAO ROU 22 SAPURIT L KAWAO ROU 23 LAMTARI L KAWAO ROU 24 CECAR MULYACI L KAWAO ROU 25 ASDURI L KAWAO ROU 26 RASTAM L PANAGRICAM RT II 27 GUKRI L KAWAO RT ON 28 A. RIFAI L KAWAO RT ON 30 SARIMA L KAWAO RT ON 31 MAMA L KAWAO ROU 32 LAMTARI L KAWAO ROU 33 JAMTAN L KAWAO ROU 34 SALIMAN L KAWAO ROU 35 SARIMAN L KAWAO ROOM 36 ASNEN L KAWAO WAZOOO 37 JADIR L KAWAO WAZOOO 38 JAPININ L KAWAO WAZOOO 39 JADIR L KAWAO WAZOOO 39 JADIR L KAWAO WAZOOO 39 JADIR L KAWAO WAZOOO 39 JADIR L KAWAO WAZOOO 39 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 31 JADIR L KAWAO WAZOOO 32 JADIR L KAWAO WAZOOO 33 JADIR L KAWAO WAZOOO 34 JADIR L KAWAO WAZOOO 35 JADIR L KAWAO WAZOOO 36 ASNEN L KAWAO WAZOOO 37 JADIR L KAWAO WAZOOO 38 JADIR L KAWAO WAZOOO 39 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 30 JADIR L KAWAO WAZOOO 31 JADIR L KAWAO WAZOOO 32 JADIR JA	8	WINAH	ρ	PANDELE1-AN		Shir	Juh
10 DIDING L KAMAO LPM 11 NASUKI L KWAO BPD 12 Ispaul Hayati P KI. KAWAO KABUT 13 DIYEN PUTWANTI P KI. WAWWIGH WABUT 14 Sahjeni L KY. BIYUKU MAKYATAKAT 15 JISAH P MENES POSYANDU 15 JA 16 M. ANIAT L BOIDN G KARANGT 15 JA 16 M. ANIAT L BOIDN G KARANGT 17 JENAL L L. KI. KAWAO TATUNA 17 JA 18 H. WALIR L KI. KAWAO TOMMAS 19 IROAN SAMBONI L KI. KI. KI. KAWAO TOMMAS 19 IROAN SAMBONI L KI. KAWAO TOMMAS 20 MINAN L KI. KI. KI. KI. KAWAO TOMMAS 21 ACIP. L ICP. KAWAO WAGITANA 19 JA 20 Q 22 Saepulin L I. KI. KAWAO R. OI 23 Jull 24 Jull 23 KAMTARI L KAWAO R. OI 23 Jull 24 Jull 24 CECEP MULYAGI L KAWAO R. OI 23 Jull 24 Jull 25 ASTURI L BOGONG RT OR 26 RASTAM L PANGRICH RT II 27 SUKRI L KAWAO RT OR 28 A. RIFAH L KAWAO RT OR 29 HAMANA L KAWAO KAWAO WAGIS 30 SURYAM L KAWAO KAWAO WAGIS 31 M. AMM R. L PENGRICHA RT OG 32 SURYAM L KAWAO RT OG 33 JURYAM L KAWAO RT OG 34 SURYAM L KAWAO RT OG 35 JURYAM L KAWAO RT OG 36 ASNEN L KAWAO RT OI 33 July 34 KAWAO 37 JALIMON L MANGRI RT OI 33 July 34 KAWAO WAGIS 38 JACIMIN L KAWAO WAGIS SING 36 M.	9	11m1 muhamad	l	menes	Stare	0 1	A
11 NASUKI L KWAO BPD 12 Ispaul Hayari P KI KAWAO KAGIT 13 DIYEN PUTWANTI P KI WAUWIDH KAGIT 14 Sahjeni L KP BIYUKU MARYATAKAT 15 J/SAH P MENES POSYANDU 15 JA 16 A 16 M. ANIAT L BOJONG KARANGT 15 JA 16 A 17 JENAL L KI KAWAO TARUNA 17 JA 18 18 H. WALLA L KP KUAO TOKNAS 19 IRRAN SAHDONI L KI MARNE MARYATAKAT 20 MINAN L KI MENIS MARYATAKAT 21 ACLI. L ICI KAWAO RW 01 22 Saepulin L "" 21 AS 22 A 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 24 CECEP MULYADI L MENIS RU 04 25 ASPULL L ROGONG PT 08 26 ROSTAM L PANGAGELOM RT 11 27 GUKRI L KAWAO RT 11 28 A. RIFAI L KAWAO RT 11 29 HAM NAH L KAWAO RT 05 30 SURYM L KAWAO RT 05 31 M. AMM L KAWAO RT 05 32 JAMIL 24 JAMIL 25 33 JECH MINAN L KAWAO RT 06 34 JECH MINAN L PENGLERAN RT 06 35 SURYM L KAWAO RT 06 36 ASNEN L KAWAO RT 06 37 JECH MINAROL L KAWAO RT 06 38 JECH MINAROL L KAWAO RT 06 39 KAWAO WICIPAOQ 31 PLYMY 32 4 SUKRA L KAWAO RT 06 31 PLYMY 32 4 SUKRA L KAWAO RT 06 33 JECH MINAROL L KAWAO RT 06 34 SUMMA L KAWAO RT 06 35 SUKRA L KAWAO RT 06 36 ASNEN L KAWAO RT 07 37 JABIR L KAWAO WICIPAOQ 35 SAP 36 38 JAFININ L KAWAO WICIPAOQ 35 SAP 36 39 JABIR L KAWAO WICIPAOQ 35 SAP 36 39 JABIR L KAWAO WICIPAOQ 37 JALIM 38 JARIM 39 39 JARIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JARIMIN L KAWAO WICIPAOQ 37 JALIM 38 39 JARIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L KAWAO WICIPAOQ 37 JALIM 38 39 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L KAWAO WICIPAOQ 37 JALIM 38 39 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L KAWAO WICIPAOQ 37 JALIM 38 39 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L KAWAO WICIPAOQ 37 JALIM 38 39 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 31 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 32 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 33 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 34 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 35 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 36 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 37 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 38 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 39 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 30 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 31 JALIMIN L SIDOMULA RT 12 31 JALIMIN L SIDOMULA RT 13 31 JALIMIN L SIDOMULA	10		7	KANAO	"""	17	10/4
12 Ispaul Hayest P Ky Kawao Kader 13 Digen Purwanti P Ky Waudulih Kadur 14 Sahjeni L Kp Biyuku Makyarakar 15 7/SAH P MENES POSYANDU 16 M. ANIAT L BOJONG KARANGT 17 JENKL K. L KP KAWAO TARUNA 18 H. WALIR L KP MENES Makyarakat 19 IROAN SANDONI L KP MENES Makyarakat 19 IROAN SANDONI L KP MENES Makyarakat 20 MIMAN L KP MENES Makyarakat 21 Acep. L ICP KAWAO NO 121 AL 22 AL 22 Saepulin L " " 21 AL 22 AL 23 KAMTARI L KAWAO RWOI 23 Jull 24 Columbia 24 CECEP MULYADI L MENGS RU 04 23 Jull 24 Columbia 25 ASPUBL L BOGONG PT 08 25 AL 26 AL 26 Ros Tam L Pandalelom RT II Kawao PT 08 27 SUKRI L Kawao PT 08 28 A Rifai L Kawao PT 00 29 Hamnah P Kawao Kader 30 Guyum L Kawao RT 06 31 M. Amm L Pendeletan RT 06 32 Julyah Wanga Sahaman 33 Dech Nunaedi L Kawao RT 01 34 Aliman L Menes RT 01 35 SUKRA L KAWAO WARGANA 36 ASNEN L KAWAO WARGANA 37 Jabip L Wulyah Pt 12 38 Japinin L Kawao RT 013 39 Japinin L Kawao RT 013 30 Suprimin L Kawao RT 013 31 M. Amma L Pendeletan RT 01 32 Julian 34 Julian L Kawao RT 013 33 Jeoh Nunaedi L Kawao RT 013 34 Aliman L Menes RT 013 35 SUKRA L KAWAO WARGANA 36 ASNEN L KAWAO WARGANA 37 Jabip L Wulyah Pt 12 38 Japinin L Sidomula Pt 12 39 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 31 Japinin L Sidomula Pt 12 32 Japinin L Sidomula Pt 12 33 Japinin L Sidomula Pt 12 34 Japinin L Sidomula Pt 12 35 Japinin L Sidomula Pt 12 36 Japinin L Sidomula Pt 12 37 Japinin L Sidomula Pt 12 38 Japinin L Sidomula Pt 12 39 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 31 Japinin L Sidomula Pt 12 32 Japinin L Sidomula Pt 12 33 Japinin L Sidomula Pt 12 34 Japinin L Sidomula Pt 12 35 Japinin L Sidomula Pt 12 36 Japinin L Sidomula Pt 12 37 Japinin L Sidomula Pt 12 38 Japinin L Sidomula Pt 12 39 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 30 Japinin L Sidomula Pt 12 31 Japinin L Sidomula Pt 1	11	NASUKI	L		BPD	11/	10 41 . 1
14 Cahjeni L Kp. Biyuku Makyarakar 13 Ch. 14 Jan. 15 J. J. S. AH P MENES POSYANDU 15 JA 16 JA. 16 M. ANIJAT L BOJON G KARANGT 15 JA 16 JA. 17 JENKL A. L KP. KAWAO TARUNA 17 JAN. 18 JA. 18 H. WALIR L KP. KAWAO TOKNAS 17 JAN. 20 Q. 19 KRAN SAMBONI L KP. MENES MAKYARAKA 19 JA.: 20 Q. 20 MINAN L KP. MENES MAKYARAKA 19 JA.: 20 Q. 21 ACEP. L ICP. KAWAO " 21 A.: 22 JAN. 22 Saepulin L " " 21 A.: 22 JA. 23 KAMTARI L KAWAO RW OI 23 JUML 24 COLL. 24 CECEP MULYAPI L MANGE RW OI 23 JUML 24 COLL. 25 ASPULA L BOGONG RT II 25 JUL 26 JAN. 26 ROSTAM L PANGAGRAM RT II 25 JUL 26 JAN. 27 SUKRI L KAWAO RT II 25 JUL 26 JAN. 28 A. PIFAI L KAWAO RT II 25 JUL 28 JAN. 29 HAM NAH P KAWAO KAMET 29 JAN. 30 SURIYAN L KAWAO KAMET 29 JAN. 31 M. AMM L PANGE ROUGHS 30 JUL 32 JUML 34 JAN. 32 SUMMAN L KAWAO KAMET 29 JAN. 33 JAN. AMM L PANGAGRAM RT OG 31 CHYM, 32 JUL 33 JUL 34 JAN. 34 JAN. AMM L PANGAGRAM RT OG 31 CHYM, 32 JUL 33 JUL 34 JAN. 35 SUKRA L KAWAO WORGAOG 35 SAG 36 J. 36 ASNEN L KAWAO WORGAOG 35 SAG 36 J. 37 JABIR L KAWAO WORGAOG 37 JUL 38 JUL 38 JABIR L KAWAO WORGAOG 37 JUL 38 JUL 38 JABIR L KAWAO WORGAOG 37 JUL 38 JUL 38 JABIR L KAWAO WORGAOG 37 JUL 38 JUL 38 JUL 39 JUL	12	Ispaul Hayeti	ρ	Kp. Kawao		111 00	12 (many
15 7/SAH P MENES POSYANDU 16 M. ANJAT L BOJONG KARANGT 17 JENKLA. L KIKAWAO TARUNA 18 H. WALIR L KIRWAD TOWNAS 19 IRDAN SAMBONI 20 MIMAN L KIP MENES MOSYANDA 21 ACEP. L ICP KAWAO RW OI 22 SAEPURIN 23 KAMTARI L KAWAO RW OI 24 CECEP MULYADI L MORGE RW O4 25 ASPURI L BORONG RT II 26 ROSTAM L PANDERUM RT II 27 SUKRI L KAWAO RT II 28 A. RIFAI L KAWAO RT II 29 HAM NAH L KAWAO RT II 29 HAM NAH L RAWAO RT II 29 HAM NAH L RAWAO RT II 30 SURVAN L KAWAO RT OB 31 M. AMM L KAWAO RT OB 32 SURVAN L KAWAO RT OB 33 SURVAN L KAWAO RT OB 34 A. RIFAI L FAWAO RT II 35 SUKRI L FAWAO RT OB 36 ASNEN L RAWAO RT OB 37 JEDIK JUMAN L KAWAO WORONG 38 A. RIFAI L KAWAO RT OB 39 AFININ L KAWAO WORONG 30 SURVAN L KAWAO WORONG 31 M. AMM L PENDERUM WONGA 32 SURVAN L KAWAO WORONG 33 JEDIK JUMAN L KAWAO WORONG 34 SOLIMAN L KAWAO WORONG 35 SURVAN L KAWAO WORONG 36 ASNEN L KAWAO WORONG 37 JABIR L KAWAO WORONG 38 JAFININ L SIDOMULA RT OI 38 JAFININ L SIDOMULA RT II 38 JAFININ L SIDOMULA RT II 39 JABIR L KAWAO WORONG 39 JABIR L KAWAO WORONG 39 JAFININ L SIDOMULA RT II	13		P	Kr. Waululuh	Kader	12 -682	10
16 M. ANIAT L BOIDN & KARANGT 15 TA 16 17 17 JENAL A. L C.P. KAWAO TARUNA 17 CAM 18 18 18 H. WAUR L KR. KIDO TOKMAS 19 IROANI SANDONI L KR. MENES MASKARAKA 19 JA. 20 Q 20 MINAN L KR. MENES MASKARAKA 19 JA. 20 Q 21 ASEP. L ICP. KAWAO " 21 A. 22 A 22 Saepulin L " 21 A. 22 A 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 24 Cecep Mulyadi L Manac RV 01 25 ASPURI L BOGONG RT 08 26 ROSTAM L Pandeletam RT 11 27 SUKM L KAWAO RT 11 28 A. PIFAI L KAWAO RT 11 29 Hamnah L KAWAO RT 03 30 SURVAM L KAWAO RT 03 31 M. AMM L KAWAO RT 03 32 SURVAM L KAWAO RT 03 33 JECH JUNGACH L KAWAO RT 03 34 ALIMON L KAWAO RT 03 35 SURVAM L KAWAO RT 06 36 ASNEN L RAWAO RT 06 37 Jabik JUNGACH L KAWAO RT 06 38 JECH JUNGACH L KAWAO RT 06 39 JADIK L KAWAO WARANG 31 PLYMY 32 M 39 JADIK L KAWAO WARANG 35 SMP 36 J. 39 JADIK L KAWAO WARANG 35 SMP 36 J. 30 JADIK L KAWAO WARANG 35 SMP 36 J. 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 39 JADIK L KAWAO WARANG 37 JADIK 38 GMT 30 JADIK 38 JADIK 11 KAWAO WARANG 38 GMT 30 JADIK 38 JADIK 11 KAWAO WARANG 38 GMT 30 JADIK 38 JADIK 38 JADIK 38 JADIK 38 JADIK 38 JADIK 38 JADIK 39 J	14	Sahjeni	L	Ky. BIYUKU	Masyarakat	13	14 J=
17 JENKLA. L CP. KAWAO TARUNA 17 CH 18 18 H. WALLE L KP. KWAO TOKNES 19 18 DAN SANDONI L M. PROMISES MASYATARA 19 JA. 20 Q 20 MINAN L KP. MENES MASYATARA 19 JA. 20 Q 21 ACEP. L L. KAWAO M. 21 A. 22 A. 22 Saepubin L " " 21 A. 22 A. 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 24 CECEP MULYADI L MENEG RW 04 25 ASPUBL L BOGONG PT 08 26 RASTAM L PANDAGELOM RT 11 27 SUKRI L KAWAO RT 11 28 A. FIFAI L KAWAO RT 11 29 HOM nah P KAWAO RT 09 30 SAGNAM L KAWAO RT 06 31 M. AMM L PENDERSAN RT 06 31 M. AMM L PENDERSAN RT 06 31 M. AMM L PENDERSAN RT 06 32 SUMMYAD L KAWAO RT 01 33 SECHET JUNGSON L KAWAO RT 01 34 SALIMAN L MANAO WAZGAOG 35 SMF 36 35 SUKRA L KAWAO WAZGAOG 35 SMF 36 36 A SNEN L KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 38 JAPININ L SLOOMULA RT 010 39 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR L WULVE PT 010 31 JADIR L WULVE PT 010 32 JADIR L WULVE PT 010 34 JADIR L WULVE PT 010 35 SMF 36 36 A SNEN L KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 JAPININ L SLOOMULA RT 010 39 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR 1 KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 JAPININ L SLOOMULA RT 12 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 31 JADIR 1 KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 JAPININ L SLOOMULA RT 12 39 JADIR 1 KAWAO RT 010 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 31 JADIR 1 KAWAO RT 010 32 JAMIL 100 33 JADIR 1 KAWAO RT 010 34 JADIR 100 35 JADIR 1 KAWAO RT 010 36 JADIR 100 37 JADIR 1 KAWAO RT 010 38 JAPININ L SLOOMULA RT 010 39 JADIR 100 30 JADIR	15		P	MENES	POSYAND4	15 -	1 1
17 JENKLA. L CP. KAWAO TARUNA 17 CH 18 18 H. WALLE L KP. KWAO TOKNES 19 18 DAN SANDONI L M. PROMISES MASYATARA 19 JA. 20 Q 20 MINAN L KP. MENES MASYATARA 19 JA. 20 Q 21 ACEP. L L. KAWAO M. 21 A. 22 A. 22 Saepubin L " " 21 A. 22 A. 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 24 CECEP MULYADI L MENEG RW 04 25 ASPUBL L BOGONG PT 08 26 RASTAM L PANDAGELOM RT 11 27 SUKRI L KAWAO RT 11 28 A. FIFAI L KAWAO RT 11 29 HOM nah P KAWAO RT 09 30 SAGNAM L KAWAO RT 06 31 M. AMM L PENDERSAN RT 06 31 M. AMM L PENDERSAN RT 06 31 M. AMM L PENDERSAN RT 06 32 SUMMYAD L KAWAO RT 01 33 SECHET JUNGSON L KAWAO RT 01 34 SALIMAN L MANAO WAZGAOG 35 SMF 36 35 SUKRA L KAWAO WAZGAOG 35 SMF 36 36 A SNEN L KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 38 JAPININ L SLOOMULA RT 010 39 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR L WULVE PT 010 31 JADIR L WULVE PT 010 32 JADIR L WULVE PT 010 34 JADIR L WULVE PT 010 35 SMF 36 36 A SNEN L KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 JAPININ L SLOOMULA RT 010 39 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR L WULVE PT 010 30 JADIR 1 KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 JAPININ L SLOOMULA RT 12 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 31 JADIR 1 KAWAO WAZGAOG 37 MAL 38 JAPININ L SLOOMULA RT 12 39 JADIR 1 KAWAO RT 010 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 30 JADIR 1 KAWAO RT 010 31 JADIR 1 KAWAO RT 010 32 JAMIL 100 33 JADIR 1 KAWAO RT 010 34 JADIR 100 35 JADIR 1 KAWAO RT 010 36 JADIR 100 37 JADIR 1 KAWAO RT 010 38 JAPININ L SLOOMULA RT 010 39 JADIR 100 30 JADIR	16		L	BOJONG	KARANGT	15 0/4	16 A
18 H. WALLA L. K.P. KWAO TOWNES 10 18 A 19 18 (AND SAMBON) L. K.P. MENES MASYERAKA 19 12 20 Q 20 MINAN L. K.P. MENES MASYERAKA 19 12 20 Q 21 ACEP. L. I.C.P. KAWAO MASYERAKA 19 12 20 Q 22 Saepusiin L. "." 23 KAMTARI L. KAWAO RW 01 24 CECEP MULYANT L. MENEG. RW 04 25 ASPURI L. BOGONG PT 08 26 Ras Tam L. Pandalekam RT 11 27 SUKRI L. KAWAO RT 11 28 A. Rifai L. KAWAO RT 11 29 Hamnah P. Kawao RT 11 30 Sugnyam L. Kawao Kader 29 Hamnah P. Kawao Kader 30 Sugnyam L. Kawao Kader 31 M. AMM L. Pendelekan RT 06 32 Sugnyam L. Kawao RT 01 33 Jedh Junaedi L. Mawao RT 01 34 Saliman L. Menes RT 04 35 SUKRA L. KAWAO WARGAOG 35 SAP 36 36 ASNEN L. KAWAO WARGAOG 35 SAP 36 37 Jabik L. Kawao RT 013 38 Japinih L. Sudomulia Rt 10 37 Met 38 39 Japinih L. Sudomulia Rt 10 37 Met 38 39 Japinih L. Sudomulia Rt 11 30 Japinih L. Sudomulia Rt 12 30 Japinih L. Sudomulia Rt 12 31 Japinih L. Sudomulia Rt 12 32 Japinih L. Sudomulia Rt 12 33 Japinih L. Sudomulia Rt 12 34 Japinih L. Sudomulia Rt 12 35 Japinih L. Sudomulia Rt 12	17		L Kp. 1	KP. KAWAO	TARUNA	15 A 1	0
20 MINAN L KP. MENES MASGRARAN 19 22 20 CL 21 A SEP. L ICP. KAWAO " 21 As 22 AZ 22 Saepulin L " 21 As 22 AZ 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 24 CECEP MULYADE L MENEG RW 04 25 ASPURI L BOJONG RT 08 26 ROSTAM L PANDELCOM RT 11 27 SUKRI L KAWAO RT 00 28 A. RIFAM L KAWAO RT 00 29 Hamnah P Kawao RT 00 30 Survey L KAWAO KANET 29 Henry 30 82 31 M. Amma L PENDELCOM RT 06 32 Survey L KAWAO KANET 29 Henry 30 82 33 Dedh Innaedi L Kawao RT 06 34 Survey L KAWAO RT 06 35 SUKRA L KAWAO RT 01 36 ASNEN L KAWAO WORONOG 35 Surf 36 37 Jabir L Kawao RT 01 38 Jafinin L Sudomulia RT 02 39 Jahran L Kawao RT 01 30 GARNAN L KAWAO WORONOG 35 Surf 36 37 Jabir L Kawao RT 01 38 Jafinin L Sudomulia RT 12 39 Jahran L Kawao RT 01 30 Jahran L Kawao RT 01 31 Jahran L Kawao RT 01 32 Jahran L Kawao RT 01 33 Jahran L Kawao RT 01 34 Jahran L Kawao RT 01 35 Jahran L Kawao RT 01 36 Jahran L Kawao RT 01 37 Jahran L Kawao RT 01 38 Jafinin L Sudomulia Rt 12	18	H. WALIR	L	Kp. KWOO	***************************************	1 CEN	18 A
20 MINAN L KP. MENIES MAGGARDAN 19 20 CL 21 A CEP. L ICP. KAWAO // 21 As 22 AZ 22 Saepulin L // // 22 AZ 23 KAMTARI L KAWAO RW 01 23 July 24 Columbia 24 Cecep Mulyachi L Manga Ru 04 23 July 24 Columbia 25 ASPURI L Bogong RT 08 25 ph 26 Bog 26 Ras Tam L Pandalakam RT 11 27 SUKRI L Kawao RT 08 28 A. RIGAI L Kawao RT 08 29 Hamnah P Kawao Kader 29 Henry 30 Zf 30 Supyum L Kawao Kader 29 Henry 30 Zf 31 M. Amm L Pendelekan RT 06 32 Supmyad L Kawao RT 01 33 Jedh Innaedi L Kawao RT 01 34 Jedh Innaedi L Kawao RT 01 35 SUKRA L Kawao RT 01 36 ASNEN L Kawao RT 01 37 Jahir L Kawao RT 01 38 Jafimin L Kawao RT 01 39 Jahir L Kawao RT 01 30 Jahir L Kawao RT 01 31 Jahir L Kawao RT 01 32 Jahir R L Kawao RT 01 33 Jahir R L Kawao RT 01 34 Jahir R L Kawao RT 01 35 Jahir L Kawao RT 01 36 ASNEN L Kawao RT 013 37 Jahir L Kawao RT 013 38 Jafimin L Sidomulia Rt 12	19	IRDAN SAMBONI	<u>ل</u>	4	Parametar Desa	10/10 11	20 (0)
21 Acq. ICP. KAWAO	20		L	KP. MENES		19 1	20 00
23 KAMTARI L KAWAO RWOI 23 Jull 24 Glu 24 CECEP MUYOON L MENEC RW 04 25 ASPURI L BOJONG RT 08 26 Rastam L Pandeleron RT II 27 SUKRI L KAWAO RT 03 28 A. Rifai L KAWAO RT 03 29 Hamnah P Kawao Kader 29 Henry 30 8 from 30 Sugnam L KAWAO KONGA 31 Reyny 32 31 M. AMM L Pendeleron RT 06 32 Suprices L Brunch Wonga 31 Reyny 32 33 Jedi Junaedi L Kawao RT 01 34 Saliman L Menes RT 04 35 SUKRA L KAWAO WIRONOO 35 36 ASNEN L KAWAO WIRONOO 35 37 Jabir L KAWAO WIRONOO 37 July 38 38 Japine L Kawao RT 01 39 REJOIN 38 GMT	21		L	ICP. KAWAO		a. /1 s	- H
CECER MULYARI L MENES RU 04 25 Chull 24 Chul 25 ASPURI L BOJONG RT 08 26 ROSTAM L PANDELLAM RT 11 27 SUKRI L KAWAO RT 09 28 A. RIFAI L KAWAO RADER 27 BM 28 AMI 29 Hamnah P Kawao Kader 29 Heng 30 82 30 Suryam L KAWAO Vrodes 29 Heng 30 82 31 M. AMR L PENDERAN RT 06 32 Suryaw L KAWAO Vrodes 31 Plying 32 M 33 Dedh Junaedi L Kawao RT 01 34 ALIMAN L Manes RT 04 35 SUKRA L KAWAO WORODOG 35 Suf 36 M 36 ASNEN L KAWAO WORODOG 35 Suf 36 M 37 Jabir L Kawao RT 013 38 Jabir L Kawao RT 013 39 PATININ L SIDOMULA RT 12 30 M	22	Sacpusin	L	11	"	21 Her	²² 94
24 CECED MULYARD L MENER RW 04 MINE 25 ASPURI L BOJONG RT 08 25 AND 26 ROSTAM L PANDERCAM RT 11 25 AND 26 ROSTAM L KAWAO RT 09 27 GAD 28 ALIFAM L KAWAO RADAY FORM 27 GAD 28 ALIFAM L KAWAO KAMAO WATONGA 30 82 MINES 30 82 MINES 31 M. AMAR L PENDERCAM RT 06 31 Plying 32 MINES 32 MINES L BOYNAM WATONGA 31 Plying 32 MINES 34 ALIFAM L MAWAO WATONGA 35 SUR ALIFAM L KAWAO WATONGA 35 SUR ALIFAM L KAWAO WATONGA 36 ASNEN L KAWAO WATONGA 37 JABIR L KAWAO WATONGA 38 JABIR L KAWAO WATONGA 37 JABIR L KAWAO WATONGA 38 JABIR L KAWAO RT 013 36 MINES 37 JABIR L KAWAO WATONGA 38 JABIR L KAWAO RT 013 37 JABIR 38 JABIR L KAWAO RE 12	23	KAMTARI	L	CAWAO	RNOI	22 1/ 10	a. Ca
25 ASPURI L BOJONG PT 08 26 Ras Tam L Pandelelam RT 11 27 SUKRI L Kawao RT 09 28 A. Riffi L Kawao RT 09 29 Hamnah P Kawao Kaker 29 Henry 30 8 ftm 30 Suprum L Kawao Kaker 29 Henry 30 8 ftm 31 M. Amr L Pendelelan RT 06 32 Supriyas L Brunks Wonga 31 Plymy 32 y 33 Dedfi I Unaedi L Rawao RT 01 34 Saliman L Menes RT 04 35 SUKRA L KAWAO WAZGAOG 35 Smf 36 M. 36 ASNEN L KAWAO WAZGAOG 35 Smf 36 M. 37 Jabir L Wulsh Pt 0/0 37 Jaku 38 Ganty 38 Japinin L Sidomulia Rt 12	24	Cecep mulyadi	L	mones		23 Come	24 Chr.
26 Ras Tam L Pandelekan RT 11 27 SUKRI L Kawao RT 09 28 A. Rifai L Kawao RT 09 29 Hamnah P Kawao Kader 29 Henry 30 8 ft 11 30 Survey L Kawao Kader 29 Henry 30 8 ft 11 31 M. Amm L L Pendelekan RT 06 32 Supriyas L Brylle Warga 31 Regry 32 M 33 Jedh Junaedi L Kawao RT 01 34 Saliman L Menes RT 04 35 SUKRA L KAWAO WAROAOO 35 Suf 36 M 36 ASNEN L Kawao RT 013 37 Jabik L Kawao RT 013 38 Japinih L Sidomulia Rt 12 38 Japinih L Sidomulia Rt 12	25	ASVURI	l			DE	26
27 SUKRI L Kawao RT OG 28 A. RIFAI L Kawao Karang farum 29 Hamnah P Kawao Kader 30 Survan L Kawao Kader 31 M. Amm L Pendeletan RT OG 32 Supriyas L Brynder Warga 31 Plying 32 M 33 Dedh Iwnaedi L Kawao RT O1 33 Plying 32 M 34 Saliman L Menes RT O4 33 Plant 34 K 35 SUKRA L KAWAO WAZOROG 35 Sinf 36 M. 36 ASNEN L KAWAO WAZOROG 35 Sinf 36 M. 37 Jabik L Wuluh Rt O10 37 Jahr 38 Canton 38 Jafinih L Sidomulia Rt 12	26	Rastan	L	Pandelelcan		25 July	26 Bart
28 A. Riffi I Kawao Karany faram 20 African 29 Hamrah P Kawao Kader 29 Henry 30 82 30 Supryan L Kawao Vroles 29 Henry 30 82 31 M. Amra I Pendeletan RT 06 32 Supryadi I Bryngh Warga 31 Ryny 32 M 33 Dedh Junaedi I Kawao RT 01 33 (May 7 34 Jahran I Menes RT 04 35 Supry 36 M 35 SUKRA I KAWAO WARGAOG 35 Sing 36 M 36 ASNEN I KAWAO WARGAOG 35 Sing 36 M 37 Jabik I Wuluh Pt 6/0 37 May 38 Candon 38 Japinin I Sidomylia Rt 12	27	SUKRI	l		RT OG	27 OM	20 In.
Hamah Reverse Rever	28	A. Rigai	L		Karany farina	21 800	28 /fcm1
30 Sugran L Kawao Vroles 23 Italy 30 8 2 31 M. Amm I Pendeletan KT06 32 Supriyas I Bryske Wonga 31 Regry 32 Up 33 Dedfi I Unaedi I Kawao RT01 33 (law 7 34 Mg 35 Su KRA I Kawao Wargaog 35 Sinf 36 Mg 36 ASNEN I Kawao Wargaog 35 Sinf 36 Mg 37 Jabik I Wuluh Rt0/0 37 Mg 38 Jafinih I Sidomulia Rt12	29	Hamnah	P	Kawao	1.	20 14 2 4	20.7
32 Supriyas L Brythe Wanga 31 Clyng 32 J 33 Dedi Junaedi L Kawao RTO1 33 Chut 34 J 34 Saliman L Menes RTO4 35 Chut 34 J 35 SUKRA L KAWAO WARGAOG 35 Sing 36 J. 36 ASNEN L Kawas RTO13 35 Sing 36 J. 37 Jabik L Wulh Rtolo 37 July 38 Cant. 38 Japinin L Sidomulia Rt 12	30		<u>L</u>	•		29 Thuff	3084
32 Sumyars I Bryth Wang 31 Reging 32 Mg 33 Start 34 Section 1 Menes RT 01 33 Start 34 Section 35 Suk RA L KAWAO WAZGAOG 35 Sinf 36 M. 36 ASNEN I Kawao RT 013 35 Sinf 36 M. 37 Jabik I Willy Pt 0/0 37 July 38 Cutty 39 Jarinin U Sidomulia Rt 12			L	Pendelekan	10	21 XH.	20 -
33 Jedfi Junaedi I Kawao R701 34 Saliman I Menes R704 35 Su KRA I Kawao Wazarag 36 ASNEN I Kawao R7013 37 Jabir I Wuluh Rt0/0 38 Japinin I Sidomulia Rt12 39 Japinin I Sidomulia Rt12		Supriyais	L		7	" Veljing	32 A
34 Solimon L Menes RT 04 35 SUKRA L KAWAO WOZGROG 35 SING 36 M. 36 ASNEN L KAWAO RT 013 37 Jabir L Wulvh Pt 0/0 37 Mark 38 Canon	33	Tedt /wnaedi	L		R701	22/10	24
35 SUKRA L KAWAO WORZONOG 35 SING 36 M. 36 ASNEN L KEWAS RT 013 35 SING 36 M. 37 Jabir L Wulvh Pt 0/0 37 Mark 38 CMD. 38 Japinin L Sidomulia Rt 12 30 Mark 38 CMD.		Y ()	l		RT 04	Whw7	34
36 ASNEN L KRW26 RT013 35 Sinf 36 M. 37 Jabir L Wulvh Pt 0/0 37 July 38 Canon	35	SUKRA	L		Warzonog	25	24
37 Jabil L Wulvh Pt 6/0 37 July 38 Candra 8t 12		ASNEN	L		<i>F</i> 1	Sint)°//
38 Parinin L Sidomula Rt 12 Mars Guil		JabiR 1	U		nt ala	37 7	20 0
39 /		Garinin	し		()	" Mate	oo (dut)
40						20	40
	40)7 	40

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA	TANGAN
41				-	41	42
42					141	42
43					43	44
44					40	44
45					45	46
46					10	40
47					47	48
48					47	140
49					49	50
50					77	JV

Warakas, 31 Agustus 2022 KETUA BPD



KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG DESA WARAKAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS Nomor: 410/017/Ds.2005/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA DESA WARAKAS,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Warakas, perlu menetapkan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;

- 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
- 23. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 2027;
- 24. Peraturan Desa Warakas Nomor **3** Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU KEDUA

Membentuk Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan

- 1. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Desa;
- 2. Menyiapkan akomodasi rapat;
- 3. Menyiapkan daftar hadir;
- 4. Menyiapkan draft tata tertib Mekanisme Penyusunan Program dan Kegiatan dalam Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa;
- Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023; dan
 Membagikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Warakas Pada tanggal : 31 Agustus 2022 KEPALA DESA WARAKAS,

ASMANI

LAMPIRAN Keputusan Kepala Warakas

Nomor: 410/017/Ds.2005/2022

Tanggal: 31 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1.	ASMANI	Penanggungjawab	Kepala Desa	
2.	SAEFULLAH	Ketua	Sekretaris Desa	
3.	M. ANAS	Sekretaris	Perangkat Desa	
4.	ROHMATULLAH	Anggota	Wakil Ketua BPD	
5.	ISPAUL HAYATI	Anggota	Perawakilan Perempuan	
6.	H WALIR	Anggota	Tokoh Masyarakat	

KEPALA DESA WARAKAS,

ASMANI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa, di Desa Warakas Kecamatan Binuang

Hari dan Tanggal : Rabu, 21 September 2022 Jam : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1. Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023;
- 2. Dibahas dan Disepakati Oleh Seluruh Hadirin Peserta Rapat

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kepala Desa

ASMANT

Warakas, 21 September 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SAEFULLAH

NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSDES) TENTANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Rabu, 21 September 2022

Jam

: 13.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: Kantor Desa Warakas

Kehadiran

: Laki-laki = orang

Perempuan =orang

Susunan Acara

: 1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD.

3. Sambutan Kepala Desa Warakas

4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa

Tahun Anggaran 2023.

5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Warakas

Uraian Jalannya Rapat:

- 1. Pembukaan.
- 2. Sambutan Ketua BPD (MAMAN F)
- 3. Sambutan Kepala Desa (ASMANI)
- 4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
- 5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat: Menyepakati Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- 1. Pembaharasan dan Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan Pimpinan Rapat,
- 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 selanjutanya akan di tugaskan untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2023.

Warakas, 21 September 2022

Sekretaris Rapat,

MAMAN F

Pimpinan Rapat,

MUHAMMAD ANAS

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Warakas

Jumlah Peserta :39..... orang

Laki-laki:30...... orang, Perempuan:9..... orang

				TADATIANI/	1	
NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA	TANGAN
1	SAEFUNHH SAEFUNHH	L	Pandeleean	sekves	1 300	2 1
2	Asman	6	ky. Kawao	KADES		-1000
3	Muhammad Ana	L	kawao	Staff desa	3 alaske	4
4	118AH	P	MENES	KADER	J. Alm	1. OF
5	Jimi muhamad	l	nenes	Staff	5-A7	6-6-1
6	Mamnah	P	Kawao	Kader	1 Ch	run
7	JULIYAH	<u> </u>	KAWAU	CADER	7 41	8 V_
8	Choirve Gunah	P	wantch	cader	000	W
10	Pastan	<u> </u>	Pandeldsan	L RT	9 Rat	10 Rant
11	Kohmatullah H. Manan F	<u> </u>	Ka Pandaucan	Bed	1	1
12	Ispaul Hayati	P	Kp. Pandducan.	posyandu,	11	12 min
13	FAWAR	<u> </u>		MA FARAL	1 To	(0.32.2)
14	HAMNAH	2	KA. MENES KAWAO	MASARAKA	13	14 product
15	Cecep Mulyadi		menes	PW 0 1	 	1
16	choirul liumah	₽	Kp. WAWELEH.	Lader	15 6_	16
17	MISMAN	7	MERICAWO	MASILAKAT.	17 No M4	1.0
18	MISICAD		1	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	17 Nem	18 0
19	SOPIAN	-	KP. PANDELECU		-	1
20	Sdeily	t	ypowae	Massyararear	19 (Inh	20 1
21	Juned.	L	120. Pondelekan	Mas/orakal	21-11	01.
22	Tajuden	L	14. Stomulya	Masyarakot	21	22
23	Dum sar	P	R. Pandelelan	Mortera Kat.	22 - 21	
24	Marnan	· .	to sidemely.	matyarakat.	23	24 \sim .
25	HUMAEDI		'KWAO'	Com	25 1/1	26 18 4
26	IRRAN SAKERONI	L	ko. Karao	Drases	25 651	20
27	Purari Ilisa Painesa	6.	ko. Menos	Kurung Turuna	27 Xuz*	28
28	H. WALIR	Ĺ	KAWAO	MASYAPAFAT	-12.003	20
29	Sanjeni	L	Bryuku	Masyarakak	29 An	30 /
30	HKathak	<u> </u>	Sardu	RTOLY	29 Jn	so ye
31	Supiyan	<u> </u>	Pandelekan	PT07	31 A	32 P ~ D
32	90'KKI	<u> </u>	XAUAO	12709	- ym	minet
33	Engry your	<u> </u>	Brysike	Words	33 /11	34 Plan 17
34 35	Dadi Unaedi	나	Kallyao	K707	1	1 June 7
36	17 HITT	ト	Pendelekan	KTOL	35 Ke 12	36
37	Salman	<u> </u>	menes	f7.09	VILORE	1 >1
38	Akudan	4	polone	W 07	37/191	38 Ang
39	S. Coman		(harrio	Karso Transity		//
40	Orac Jan -	-	/ warrier	Kloods	39	40
41					- †	
42					41	42
43						
44					43	44
45						
46			-		4 5	46
47						
48					47	48
49						
50					49	50
51					<u></u>	
52					51	52
						L







PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS Nomor : 410/05/BPD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun anggaran 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
- 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
- 23. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 2027;
- 24. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan

:

: Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) tentang pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- 1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - Laporan hasil penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
 dan
 - b. Pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2023
- 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2023;
- 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
- 4. Menyiapkan daftar hadir;
- 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
- 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
- 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Warakas Pada tanggal 25 Agustus 2022 KETUA BPD WARAKAS,

LAMPIRAN Keputusan BPD Warakas

Nomor : 410/05/BPD/2022 Tanggal 25 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ROHMATULLAH	Penangung Jawab	Sekretaris BPD
2.	MAMAN F	Ketua	Anggota BPD
3.	SAEFULLAH	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	DIDING	Anggota	LKMD
5.	H.WALIR	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	ISPAUL HAYATI	Anggota	Perwakilan Perempuan
7.	TINI SUHARTINI	Anggota	Kader Pembangunan Manusia (KPM)

KETUA BPD WARAKAS,

MAMAN F



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG NOMOR: 144/Kep-017 Pem/DS.2005/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA WARAKAS.

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesui pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014
- b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat

- 16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
- 17. Peraturan Desa Warakas Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
- 18. Peraturan Desa Warakas Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Verifikasi dokumen RKP Desa Tahun 2023 - sebagai berikut :

Pembina

:1. H. Maman F

(Kepala Desa)

Ketua

:2. Jimmi M

(BPD)

Sekretaris

:3. Jisah

(Perempuan)

Anggota

4. Abdul Sukur

(Keahlian Bidang

Penyelenggra Pemeritah Desa)
5. Abdul Wahab (Keahlian Bidang

Pembanguna Desa)

6. M. Tohir (Keahlian Bidang

Pembinaan

Masvarakt)

7. Rohim (Keahlian Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat)

8. Sarman (Keahlian Bidang

Penanggulangan Bencana

Kedua

: Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKPDes adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Transmigrasi. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Transmigrasi. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Keempat

: Tim Verifikasi RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima

: Masa tugas Tim Verifikasi RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warakas

Pada Tanggal 20 Juli 2022

KEPALA DESA WARAKAS

ASMAN